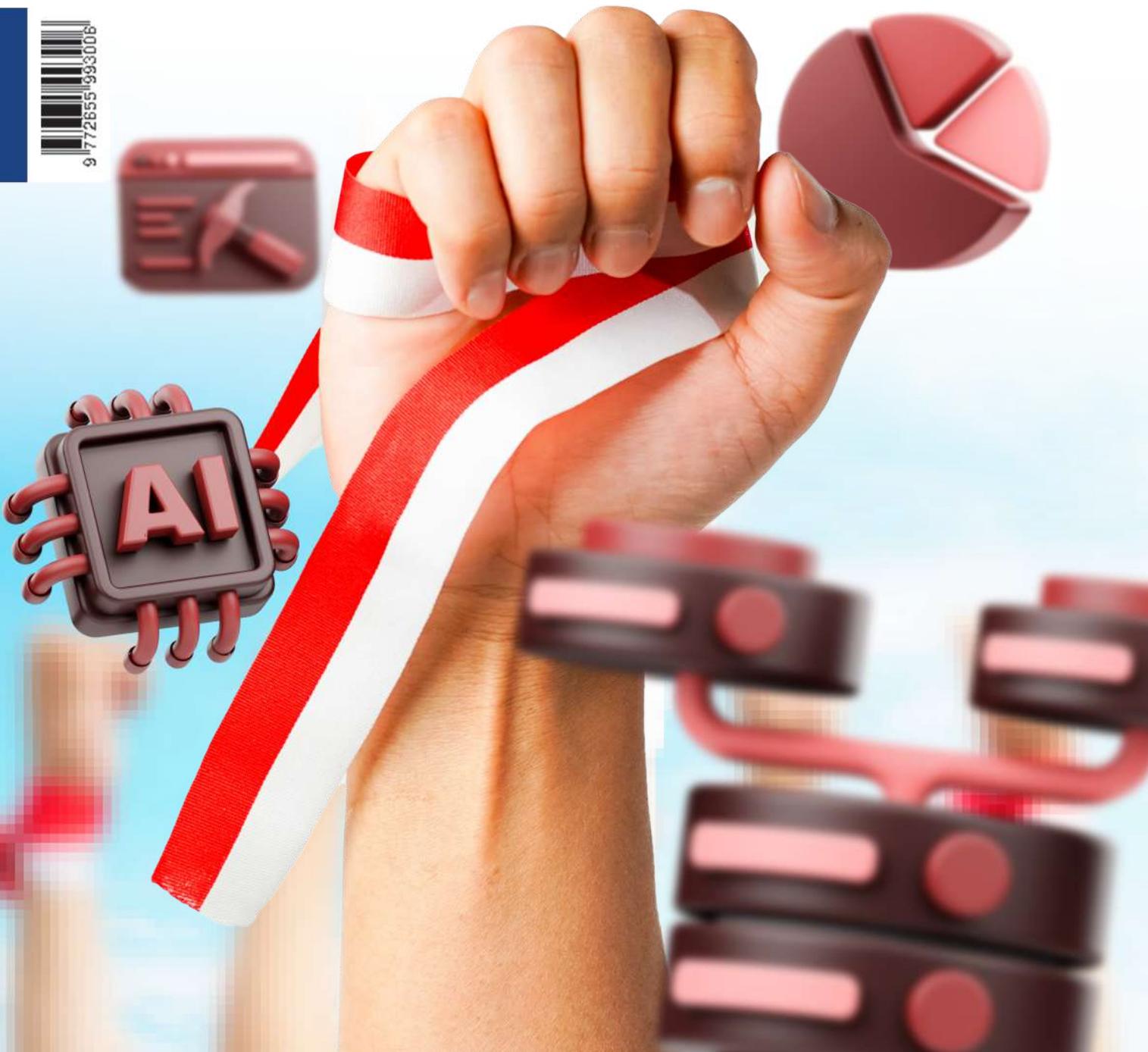


Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika



Kebangkitan Informasi.  
**Kemajuan Bangsa.**

Edisi 53  
Mei 2023



**TIM  
REDAKSI****Pengarah:**  
Mira Tayyiba**Pemimpin Redaksi:**  
Rhina Anita**Wakil Pemimpin Redaksi:**  
Daoni Diani Hutabarat**Redaktur Pelaksana:**  
Helmi Fajar Andrianto**Wakil Redaktur  
Pelaksana:**  
Viskayanesya**Redaktur:**  
M. Taufiq Hidayat  
Verawati  
Annisa Bonita P.**Reporter:**  
Yusuf  
Ahmad Irso Kubangun  
Meita Pusparini  
Desideramus Bitan**Fotografer:**  
Agus Yudi Harsono  
Doni Paulus Sumule  
Sri Indrati Novinarsari  
Indra Kusuma**Desain & Layout:**  
Adista Winda Rizka  
Rahma Aulia Indroputri  
Dhenty Febrina Sahara  
Annas Yudistira Saputra**Produksi:**  
Fahmie Trihatin J.**Alamat Redaksi:**  
Biro Humas Kementerian  
Komunikasi dan Informatika  
Jl. Medan Merdeka Barat  
No. 9, Jakarta Pusat

# Kualitas Layanan Sebagai Tulang Punggung Kehidupan Modern

Kualitas layanan atau *Quality of Service* (QoS) di bidang telekomunikasi seringkali menjadi penentu keberhasilan sebuah penyedia layanan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Di sebuah era di mana data dan informasi mengalir lebih cepat dari sebelumnya, kehandalan dan efisiensi sebuah jaringan telekomunikasi menjadi faktor kunci. QoS membantu memastikan bahwa data disampaikan secara efektif, dengan latensi rendah dan tanpa gangguan yang berarti, memungkinkan operasi sehari-hari, baik itu dalam konteks bisnis atau pribadi, berjalan dengan lancar.

Namun, QoS bukan hanya tentang kecepatan dan kehandalan jaringan saja. Ini adalah sebuah konsep yang holistik, mencakup berbagai aspek seperti keamanan data, aksesibilitas, dan bahkan dukungan pelanggan. Karena itu, dalam industri telekomunikasi, QoS menjadi salah satu metrik utama yang secara aktif diukur, dianalisis, dan ditingkatkan.

Telekomunikasi memiliki peran yang sangat krusial dalam menopang hampir semua sektor kehidupan modern. Sebuah gangguan kecil pada jaringan bisa berdampak besar pada berbagai layanan penting, mulai dari perbankan hingga layanan darurat. Untuk itu mengukur dan memonitor QoS bukanlah tugas yang mudah, tetapi sangat penting.

Monitoring dilakukan melalui serangkaian tes dan pengukuran yang kompleks, yang seringkali melibatkan berbagai metrik, algoritma, dan teknologi terbaru.

**Rhina Anita**Kepala Biro Hubungan Masyarakat  
**Pemimpin Redaksi Majalah Kominfo Next**

Tes-tes ini harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa jaringan tetap berfungsi pada puncak efisiensinya, dan juga untuk mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan.

Pada momen-momen tertentu, seperti mudik contohnya, memberikan tantangan tersendiri bagi penyedia layanan telekomunikasi. Ada pergeseran besar dalam pola penggunaan jaringan, dari area perkotaan ke pedesaan atau area dengan infrastruktur yang mungkin belum sebanding. Selain itu volume komunikasi—baik suara maupun data—biasanya mengalami peningkatan signifikan. Jika QoS tidak dikelola dengan baik, potensi gangguan atau penurunan kualitas layanan bisa sangat mengganggu, merusak pengalaman mudik itu sendiri dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penyedia layanan.

Dengan perhatian yang terfokus pada QoS, terutama selama periode kritis seperti masa mudik, penyedia layanan telekomunikasi tidak hanya menunjukkan komitmennya dalam menyediakan layanan yang berkualitas tetapi juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi dan memperkuat ikatan sosial dan budaya.

Menjaga kualitas komunikasi yang stabil dan handal selama masa-masa penting ini bukan hanya soal kepuasan pelanggan, tetapi juga tentang bagaimana teknologi bisa membantu masyarakat menjaga dan merayakan tradisi, budaya, dan hubungan yang paling berharga.

Pada akhirnya, QoS bukan hanya sekadar angka dan statistik tetapi tentang komitmen untuk menciptakan pengalaman yang lebih baik untuk para pengguna.

Dalam dunia yang semakin terhubung ini, kualitas layanan telekomunikasi berfungsi sebagai tulang punggung yang mendukung berbagai aspek kehidupan modern. Karena pada akhirnya, sebuah jaringan yang kuat dan handal tidak hanya memperkaya kehidupan kita tetapi juga membantu memperkuat fondasi dari masyarakat yang lebih terhubung dan harmonis.

**Selamat membaca!**



**QoS bukan hanya  
sekadar angka  
dan statistik  
tetapi tentang  
komitmen untuk  
menciptakan  
pengalaman yang  
lebih baik untuk  
para pengguna**

# IMF: Kondisi Ekonomi Indonesia **Baik dan Stabil** di Tengah Ketidakpastian Global



Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, di Hotel Rihga Royal, Hiroshima, Jepang, pada Sabtu, 20 Mei 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, di Hotel Rihga Royal, Hiroshima, Jepang, pada Sabtu, 20 Mei 2023. Dalam pertemuan tersebut, Direktur Pelaksana IMF menilai kondisi ekonomi Indonesia cukup baik dan stabil di tengah situasi perekonomian dunia yang sedang dihadapkan dengan banyak ketidakpastian.

"Di tengah situasi ekonomi dunia yang diwarnai banyak ketidakpastian, ekonomi Indonesia cukup baik dan stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia," ucap Kristalina.

Sementara itu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh 5,1 persen pada tahun 2023, dan 5 persen pada tahun 2024. Melihat hal tersebut, IMF berharap Indonesia dapat ikut serta dalam memberikan bantuan kepada negara berkembang lainnya.

"IMF harapkan bantuan Indonesia kepada negara berkembang lain, terutama di bidang pengentasan kemiskinan," kata Kristalina.

Direktur Pelaksana IMF juga menilai bahwa Indonesia memiliki peran penting di tengah situasi dunia yang sedang menghadapi banyak tantangan saat ini. Indonesia dinilai mampu untuk menjalin hubungan dan berkomunikasi dengan semua pihak.

"Indonesia dapat berbicara dengan semua negara, semua pihak, dan di tengah dunia yang hadapi banyak tantangan seperti saat ini, diperlukan lebih banyak lagi peran seperti yang dimainkan oleh Indonesia," tandasnya.

<https://www.presidenti.go.id/siaran-pers/imf-kondisi-ekonomi-indonesia-baik-dan-stabil-di-tengah-ketidakpastian-global/>

# Kebijakan Golden Visa akan Tarik Talenta Berkualitas

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama jajarannya pada Senin, 29 Mei 2023 di Istana Merdeka, Jakarta, guna membahas kebijakan *golden visa* bagi warga negara asing. Dalam keterangannya usai mengikuti rapat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno mengatakan bahwa kebijakan tersebut dapat menarik lebih banyak talenta berkualitas dari berbagai jenis bidang.

"*Golden visa* yaitu kebijakan baru yang akan kita luncurkan dalam waktu yang singkat untuk menarik lebih banyak talenta-talenta berkualitas di bidang digitalisasi, di bidang kesehatan maupun juga talenta di bidang riset, maupun juga berkaitan dengan teknologi," ujarnya.

Menparekraf menambahkan, saat ini dunia banyak membutuhkan talenta-talenta baru, salah satunya dari sisi ekonomi digital. Untuk itu, Menparekraf berharap kebijakan tersebut tidak hanya dapat membuka lapangan pekerjaan, tetapi menjadikan Indonesia sebagai episentrum pergerakan ekonomi ke depan.

"Kita harapkan ini membuat Indonesia menjadi episentrum dari pergerakan ekonomi ke depan termasuk juga tentang *sustainability*, tentang keberlanjutan," tambahnya.

"Kita harapkan *golden visa* ini yang nanti jangka waktunya 5 sampai 10 tahun menjadi *game changer*, menjadi sesuatu yang berbeda dan akan membawa lebih banyak juga wisatawan baik yang disebut *digital nomad* maupun yang juga berkaitan dengan digital *entrepreneur* yang akan berinvestasi di Indonesia," lanjutnya.

Sementara terkait payung hukum dari kebijakan *golden visa*, Sandiaga menyebut bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) akan memastikan hal tersebut termasuk peraturan turunan di dalamnya.



Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama jajarannya pada Senin, 29 Mei 2023 di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: BPMI Setpres/Rusman



**...untuk menarik lebih banyak talenta-talenta berkualitas di bidang digitalisasi, di bidang kesehatan maupun juga talenta di bidang riset, maupun juga berkaitan dengan teknologi**

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/kebijakan-golden-visa-akan-tarik-talenta-berkualitas/>

# Hadiri Sesi Leader's Insight FEKDI 2023, Wapres Paparkan Strategi Digitalisasi Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN

---

Wapres pun menilai, program-program edukasi oleh kementerian/lembaga (K/L) tentang penggunaan internet untuk kemajuan pribadi, masyarakat, dan negara sangat strategis untuk digiatkan

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin pagi ini, Rabu (10/05/2023) menghadiri secara virtual sesi *Leader's Insight* Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres memaparkan strategi pemerintah untuk memperkuat ekosistem digitalisasi, khususnya ekonomi digital dan daya saing keuangan Indonesia menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN *Economic Community*.

Mengawali paparannya, Wapres menyatakan, minat masyarakat terhadap layanan keuangan digital yang terus bertumbuh sebagai salah satu dampak dari pandemi Covid-19, harus disadari sebagai peluang dan tantangan bagi semua pemangku kepentingan untuk membentuk ekosistem keuangan digital yang efektif, inovatif, inklusif, berkelanjutan, dan aman.

"Ke depan, aksesibilitas dan keterjangkauan layanan keuangan digital perlu diperluas hingga menjangkau masyarakat di seluruh pelosok tanah air, demi meningkatkan inklusi keuangan yang akan mendorong pemulihan ekonomi nasional yang kokoh, berkelanjutan, dan lebih merata," tegasnya.

Peluang itu, tambah Wapres, juga ada pada tataran kawasan ASEAN. Sebab menurutnya, integrasi ekonomi ASEAN tidak mungkin terlepas dari kebutuhan untuk mentransformasi ASEAN menjadi kawasan digital demi meraup sebanyak-banyaknya manfaat dari digitalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan, seperti peningkatan peluang bisnis, peningkatan kualitas produk dan jasa, peningkatan produktivitas dan efisiensi, serta peningkatan daya saing.

"Oleh karenanya, kerja sama ASEAN juga diarahkan untuk memperkokoh ekonomi dan keuangan digital," ungkap Wapres. "Terkait hal ini, ketimpangan digital yang masih terjadi di ASEAN menjadi salah satu isu yang perlu segera diatasi bersama oleh negara anggota ASEAN," imbuhnya.

Di dalam negeri, lanjut Wapres, pengembangan ekonomi dan keuangan digital diupayakan, antara lain, dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur digital, membentuk peraturan perundang-undangan yang menunjang pembangunan digital, termasuk Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024, serta mengencarkan edukasi dan literasi digital.

“Pemerintah Indonesia menyadari sektor digital adalah sebuah struktur yang kompleks, berubah dengan cepat, dan kerap memunculkan isu-isu baru,” sebut Wapres.

Dengan ratusan juta penduduk Indonesia yang diketahui sebagai pengguna aktif internet, Wapres pun menilai, program-program edukasi oleh kementerian/lembaga (K/L) tentang penggunaan internet untuk kemajuan pribadi, masyarakat, dan negara sangat strategis untuk diaktifkan bagi masyarakat Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Wapres menyinggung langkah pemerintah Indonesia menyongsong era penggunaan kecerdasan buatan, yang pada awal 2020 sempat diprediksi oleh beberapa ekonom dan lembaga keuangan, seputar hilangnya beragam lapangan kerja akibat tergantikan robot dan mesin. Ia menegaskan, pemerintah terus mengkaji dan mengamati perkembangan domestik dan global untuk menghasilkan kebijakan yang efektif.

Menutup paparannya, Wapres mengucapkan selamat atas penyelenggaraan FEKDI 2023 sekaligus peluncuran kartu kredit pemerintah

bernama Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan QRIS Antarnegara Indonesia-Malaysia. Ia berharap, K/L dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan KKI ini dalam bertransaksi.

“Saya mengimbau kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan KKI sebagai instrumen pembayaran yang efisien sekaligus selaras dengan penguatan pengelolaan keuangan negara,” pungkasnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Mohammad Rudy Salahuddin melaporkan perkembangan ekonomi digital Indonesia yang pada 2022, nilainya mencapai 77 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 22% dari tahun sebelumnya. Ia mengungkapkan, angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai pemain utama ekonomi digital di regional dan menguasai lebih dari 40% pangsa ASEAN.

<https://www.wapresri.go.id/hadiri-sesi-leaders-insight-fekdi-2023-wapres-paparkan-strategi-digitalisasi-menuju-masyarakat-ekonomi-asean/>



Membentuk Kebiasaan Baik

# Atomic Habits

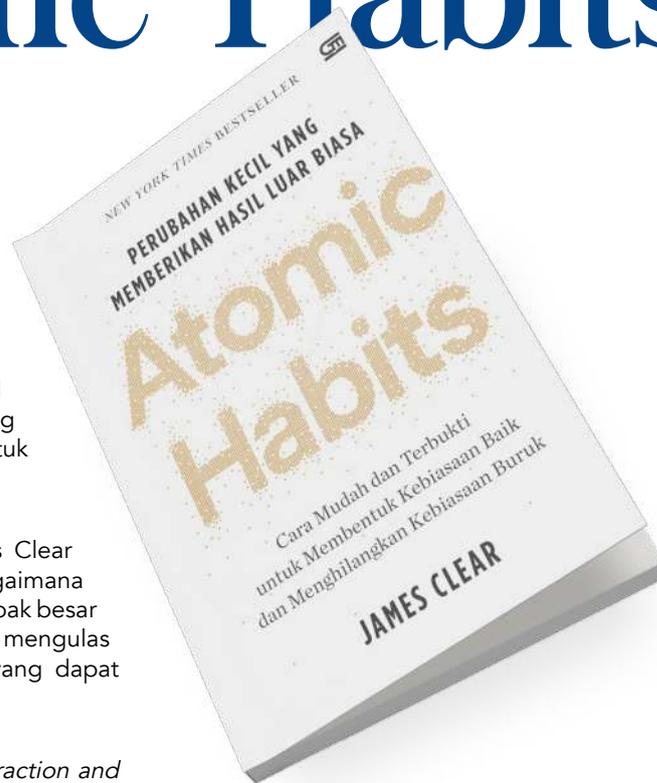
Seringkali ucapan "Aku ingin menjadi seseorang yang lebih baik" berakhir hanya sebatas ucapan dan keinginan semata. Bukan karena tidak adanya keinginan, namun terkadang kita terlalu berfokus pada hal-hal besar dan hasil akhir, bukan pada proses, yang akhirnya semua terasa berat untuk dicapai.

Buku "Atomic Habits" karya James Clear adalah panduan praktis tentang bagaimana membentuk kebiasaan yang berdampak besar dalam kehidupan kita. Buku ini mengulas konsep kebiasaan-kebiasaan kecil yang dapat menghasilkan hasil yang signifikan.

Clear juga memanfaatkan *law of attraction and aversion* dalam tulisannya untuk membuat kebiasaan baru lebih menarik dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, kita memiliki peluang yang lebih besar untuk menjalankan kebiasaan baru secara konsisten. Dari bagaimana memulai membentuk kebiasaan baik, menghilangkan kebiasaan buruk, sampai mengubah mindset tentang kebiasaan.

Buku ini menjelaskan tentang kebiasaan yang didefinisikan terbentuk dari 3 elemen: sinyal (*cue*), rutinitas (*routine*), dan imbalan (*reward*). Dimana kita diajak untuk merancang kebiasaan yang lebih baik dengan mengidentifikasi sinyal, mengubah rutinitas, dan menghubungkannya dengan imbalan yang memuaskan.

Keinginan yang kuat akan membantu kita agar tetap termotivasi untuk menjalankan kebiasaan, yang mana tidak terlepas dari tantangan yang harus kita hadapi. Dengan memahami manfaat dari kebiasaan yang kita bentuk, kita akan lebih cenderung untuk tetap konsisten.



Clear juga memaparkan ide bahwa perubahan kecil yang konsisten seiring waktu dapat menghasilkan transformasi besar. Sebagaimana kenaikan 1% dalam berbagai aspek kehidupan, dapat mengakumulasi menjadi perubahan yang signifikan dalam jangka panjang.

Yang menarik dari buku ini adalah penulis juga memberikan beberapa strategi yang praktis untuk mengatasi hambatan (penundaan, gangguan, dan kurangnya motivasi) termasuk mengubah lingkungan fisik dan menggunakan teknik penguatan positif.

Secara keseluruhan, "Atomic Habits" adalah buku yang sangat informatif dan mudah untuk diterapkan secara langsung, penuh dengan contoh nyata dan penelitian ilmiah. Clear menyajikan materi yang rumit dengan gaya penulisan yang mudah dipahami, membuatnya sesuai untuk pembaca dari berbagai latar belakang.

# KOLEKSI BUKU BARU PERPUSTAKAAN KOMINFO



Selain judul buku diatas, ada juga terbitan dari  
pengarang : **Tere Liye, Ika Natassa, Agatha  
Christie, Almira Bastari, Leila S. Chudori, Keigo  
Higashino, Matt Haig, Dee Lestari, C.S Lewis, Rick  
Riordan, Enid Blyton, Maman Suherman, Valerie  
Patkar, dan lainnya**

## Layanan Perpustakaan

<b>Senin – Kamis</b>	Jam 09.00–15.00
<b>Jumat</b>	Jam 09.00–11.30 Jam 13.30–15.30

Akses katalog di

<http://perpustakaan.kominfo.go.id/>

(hanya bisa diakses dari jaringan internal kominfo)

**Perpustakaan Kementerian Kominfo**

Gedung Belakang Lt 1 Jl. Medan Merdeka Barat No 9, Jakarta Pusat

# Apa Itu QoS?



## Halo Sobatkom!

Sudah tahu apa belum bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika secara periodik melakukan pengukuran *Quality of Service* atau yang lebih dikenal dengan QoS untuk memastikan bahwa masyarakat bisa menggunakan layanan telekomunikasi dengan baik, terutama pada momentum khusus seperti arus mudik, perayaan lebaran maupun libur panjang.

Pada momen khusus seperti ini, sering terjadi lonjakan pengunjung di suatu daerah seperti kota-kota tujuan mudik hingga tempat-tempat wisata yang secara linear juga akan membuat trafik telekomunikasi melonjak.

Pengukuran QoS pada tempat-tempat yang berpotensi mengalami lonjakan pada momen

khusus ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan operator telekomunikasi dalam menangani potensi lonjakan trafik telekomunikasi

### Apa saja Manfaat QoS?

Dalam jaringan komunikasi modern, QoS berperan sebagai pilar penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan yang beragam dan sumber daya jaringan yang terbatas karena tuntutan digital yang semakin membesar mulai dari komunikasi *real time* hingga streaming media yang membutuhkan *bandwidth* besar.

Dengan menerapkan QoS, penyedia layanan bisa memastikan bahwa semua aplikasi, layanan, dan pengguna memperoleh tingkat layanan yang mereka butuhkan untuk beroperasi secara efektif seperti :

### Prioritas trafik

Merupakan salah satu manfaat utama dimana penyedia layanan memiliki kemampuan untuk memprioritaskan jenis-jenis lalu lintas data.

### Kinerja yang lebih baik

Dengan manajemen trafik yang baik, pengguna layanan telekomunikasi bisa mendapatkan kinerja aplikasi dan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya.

### Alokasi sumber daya yang efisien

QoS memungkinkan alokasi *bandwidth* dan sumber daya lainnya secara lebih efisien sehingga dapat menghindari pemborosan kualitas jaringan.

### Mengurangi Latensi dan *Jitter*

Latensi dan *jitter* merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada kualitas aplikasi *video call*. QoS bisa mengurangi latensi dan *jitter* sehingga dapat menjamin kualitas komunikasi.

### Reliabilitas

Dengan manajemen lalu lintas yang efisien dapat meningkatkan performa jaringan dengan mengurangi kemungkinan penurunan kinerja yang tiba-tiba sehingga mengganggu layanan telekomunikasi.



# Apa Saja Parameter QoS?

QoS merupakan standar dalam desain dan implementasi jaringan telekomunikasi modern. Untuk itu QoS memiliki parameter seperti *bandwidth*, *latency* dan *jitter* yang dapat diukur, dimonitor dan dioptimalkan untuk berbagai kebutuhan pengguna.

## 01 Bandwidth

Merupakan kapasitas jaringan dalam bit per detik(bps). Salah satu tugas QoS adalah mengalokasikan *bandwidth* yang sesuai untuk jenis trafik tertentu. Kebutuhan *bandwidth* untuk *video call* tentu berbeda dengan kebutuhan *bandwidth* untuk berkirim email.

## 04 Reliability

Merupakan parameter yang menunjukkan tingkat keberhasilan dalam pengiriman data antara dua titik dalam jaringan. QoS berusaha meningkatkan keandalan jaringan melalui mekanisme seperti prioritas dan alokasi sumber daya.

## 02 Latency

Merupakan ukuran waktu yang dibutuhkan oleh paket data untuk bergerak dari sumber ke tujuan. *Latency* yang rendah sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan koneksi secara *real time* seperti *game online* berbasis *multiplayer*.

## 05 Throughput

Merupakan ukuran efisiensi jaringan, biasanya diukur dalam bit per detik dan menunjukkan sejauh mana jaringan dapat mengirimkan data dengan efektif.

## 03 Jitter

Merupakan variasi dalam keterlambatan antara paket data yang berbeda, semakin rendah jitter, kualitas jaringan semakin baik.

## 06 Packet Loss

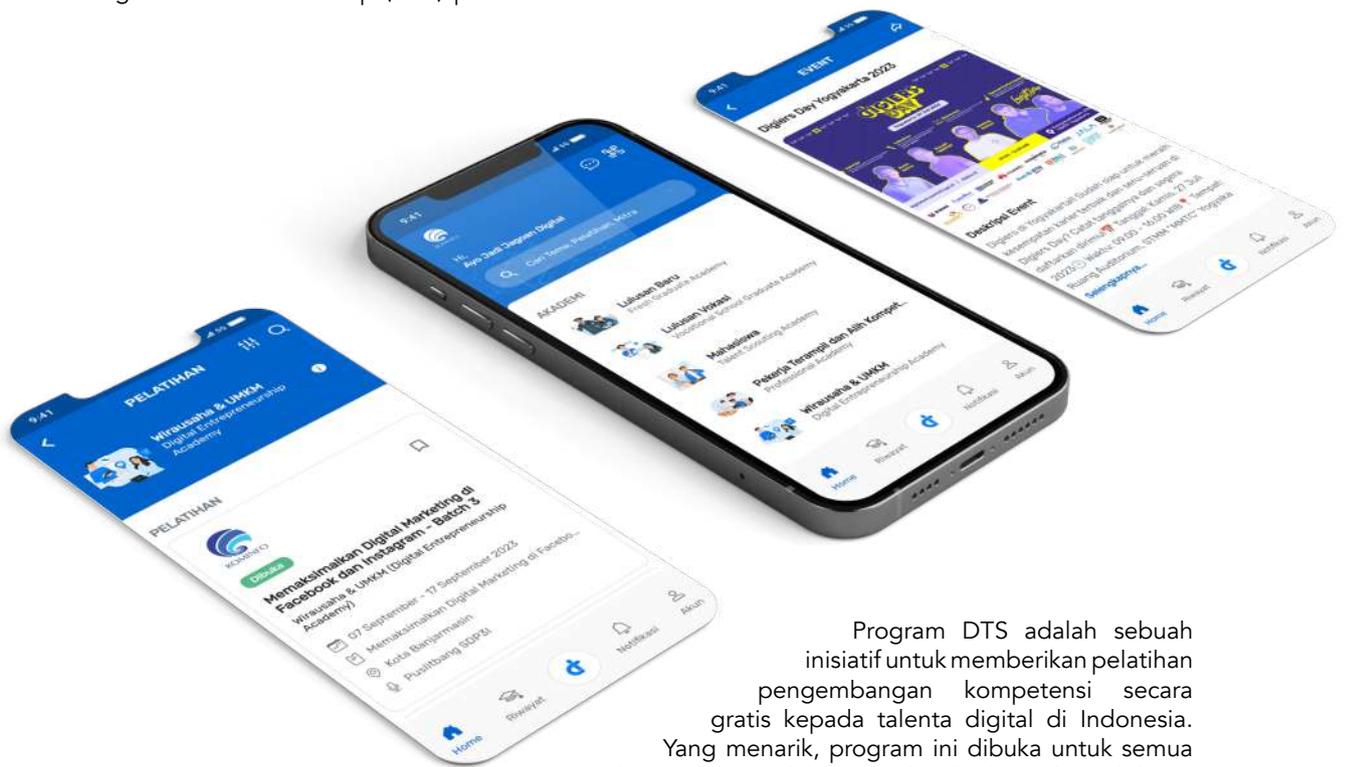
Merupakan persentase paket data yang hilang selama transmisi. Salah satu tujuan QoS adalah untuk menekan jumlah *packet loss*.

Pengelolaan pada parameter-parameter ini merupakan salah satu kunci QoS yang sukses sehingga dapat memaksimalkan efisiensi sumber daya dan kinerja jaringan dengan baik.

Jadi, buat SobatKom yang suka main *game multiplayer online* ada baiknya untuk cek jaringan terlebih dahulu. Apakah *latency* dan *jitter*nya tinggi? Apabila tinggi lebih baik ditunda dulu daripada mengalami *lag* dan kalah saat bermain *game*.

# Meningkatkan Daya Saing Diri Aplikasi Digitalent

Dunia saat ini berada di ambang revolusi Industri 4.0, di mana digitalisasi, automasi, dan kecerdasan buatan mendefinisikan ulang cara kita hidup dan bekerja. Dalam konteks ini, Indonesia tidak mau ketinggalan. Sebagai negara dengan populasi yang muda yang besar dan potensi digital yang belum sepenuhnya tergarap, Indonesia memerlukan tenaga kerja yang terampil di bidang teknologi informasi. Sebagai jawaban atas tantangan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meluncurkan program Digital Talent Scholarship (DTS) pada tahun 2018.



Program DTS adalah sebuah inisiatif untuk memberikan pelatihan pengembangan kompetensi secara gratis kepada talenta digital di Indonesia.

Yang menarik, program ini dibuka untuk semua lapisan masyarakat: mulai dari *fresh graduate*, lulusan sekolah vokasi, mahasiswa, pekerja profesional, hingga pengusaha. Tak hanya itu, aparatur sipil negara (ASN) juga bisa ikut serta dalam program ini.

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan daya saing para talenta Indonesia di bidang teknologi informasi. Dengan demikian, mereka akan lebih siap menghadapi dunia kerja yang semakin kompleks dan kompetitif.



## Delapan Akademi dalam DTS

Program DTS membagi pelatihan-pelatihannya ke dalam delapan akademi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok:

### Fresh Graduate Academy (FGA)

Akademi ini ditujukan untuk lulusan baru yang belum memiliki banyak pengalaman di dunia kerja.

### Vocational School Graduate Academy (VSGA)

Khusus untuk lulusan sekolah vokasi, untuk mempersiapkan mereka dalam berkarir di industri terkait.

### Professional Academy (ProA)

Akademi ini membahas topik-topik tertentu dalam dunia teknologi, seperti *cybersecurity* atau pengembangan aplikasi.

### Thematic Academy (TA)

Akademi ini membahas topik-topik tertentu dalam dunia teknologi, seperti *cybersecurity* atau pengembangan aplikasi.

### Government Transformation Academy (GTA)

Khusus untuk ASN yang ingin meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.

### Digital Entrepreneurship Academy (DEA)

Bagi para pengusaha atau calon pengusaha yang ingin memahami lebih dalam tentang dunia bisnis digital.

### Digital Leadership Academy (DLA)

Mengajarkan keterampilan kepemimpinan dalam konteks digital.

### Talent Scouting Academy (TSA)

Sebuah program untuk menemukan dan mengasah talenta-talenta baru di bidang digital.





Aktivitas QoS di daerah Wonosobo, Jawa Tengah oleh tim Kominfo

# Optimasi Quality of Service di Era Digital

Antara Kesiapan dan Tantangan



**QoS telah berkembang dari konsep teknis menjadi tuntutan sosial, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan dan pendidikan hingga aspek kesejahteraan umum**

Di era teknologi informasi yang kian maju dan serba digital, kualitas layanan telekomunikasi atau *Quality of Service* (QoS) telah menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa diabaikan. QoS telah berkembang dari konsep teknis menjadi tuntutan sosial, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan dan pendidikan hingga aspek kesejahteraan umum.

Memastikan QoS yang optimal dimulai dengan fondasi yang kuat seperti infrastruktur. Tanpa infrastruktur yang memadai, layanan telekomunikasi tidak akan mampu menjangkau seluruh wilayah atau menawarkan kecepatan dan stabilitas yang dibutuhkan oleh pengguna. Maka dari itu, peningkatan terus-menerus terhadap infrastruktur, termasuk menara seluler, serat optik, dan satelit komunikasi, merupakan salah satu upaya vital dalam mempertahankan QoS.

Selain infrastruktur, pengelolaan dan alokasi *bandwidth* juga memegang peranan penting. Pada jam-jam sibuk atau ketika terjadi kejadian besar yang mengundang perhatian publik, *bandwidth* bisa menjadi sangat terbatas. Manajemen *bandwidth* yang cerdas dan adaptif menjadi keharusan untuk memprioritaskan layanan yang lebih krusial atau mendesak, seperti layanan darurat atau komunikasi penting.

Teknologi selalu bergerak maju. Maka, implementasi teknologi terbaru seperti 5G atau teknologi *edge computing* turut berpengaruh besar dalam QoS. Dengan kecepatan dan kapasitas yang lebih besar, teknologi-teknologi ini memungkinkan layanan telekomunikasi untuk lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.

Dalam dunia yang semakin terhubung, aspek keamanan siber juga tidak bisa diabaikan. Ancaman seperti peretasan dan serangan DDoS bisa sangat mengganggu QoS. Oleh karena itu, pengamanan siber menjadi salah satu aspek integral dari QoS. Ini tidak hanya melibatkan penerapan *firewall* dan sistem keamanan lainnya tetapi juga termasuk pemantauan dan tanggapan terhadap potensi ancaman.

Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, penyedia layanan, dan pengguna, juga menjadi salah satu faktor kunci. Penyedia layanan perlu untuk secara aktif mengumpulkan *feedback* dari pengguna dan bekerja sama dengan pemerintah dalam regulasi dan implementasi teknologi baru.

QoS tidak hanya tentang kecepatan internet atau kapasitas *bandwidth* tetapi juga tentang bagaimana layanan tersebut dapat mempengaruhi kehidupan orang. Dengan semakin banyaknya orang yang bekerja atau belajar dari rumah, kebutuhan untuk QoS yang tinggi menjadi lebih krusial dari sebelumnya. Hal ini juga mencakup kebutuhan untuk layanan yang inklusif dan merata, memastikan bahwa semua individu, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau kurang mampu, juga mendapatkan akses ke layanan telekomunikasi berkualitas.

Mempertahankan QoS yang tinggi juga membutuhkan pemantauan dan evaluasi yang konstan. Metrik seperti kecepatan *download*, *latency*, dan kestabilan koneksi perlu diukur dan dianalisis secara berkala untuk memastikan bahwa layanan tetap memenuhi standar yang diharapkan. Terutama pada momentum-momentum khusus seperti mudik yang setiap tahun terjadi.

Tahun ini, ketika PPKM dicabut dan mudik kembali diperbolehkan, pemerintah dan para *stakeholders* menghadapi tantangan baru dalam menyediakan layanan telekomunikasi yang berkualitas, terutama untuk mengantisipasi lonjakan penggunaan jaringan terjadi selama arus mudik dan arus balik.



“

...lonjakan trafik arus mudik berarti akan sejalan dengan lonjakan trafik telekomunikasi

Peningkatan trafik diprediksi mengalami peningkatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena banyak masyarakat yang sudah menahan untuk tidak mudik selama dua tahun pandemi, sehingga ketika sudah diperbolehkan mereka akan berbondong-bondong mudik untuk melepas rindu dengan kampung halaman.

Mudik lebaran pasca-pandemi ini tidak hanya menjadi tes bagi kesiapan dalam beradaptasi dengan keadaan, tetapi juga menjadi ajang untuk menguji sejauh mana infrastruktur dan layanan kita telah berkembang dan matang.

## Persiapan Kominfo

Peningkatan trafik layanan telekomunikasi saat mudik bukanlah sesuatu yang baru. Setiap tahunnya Kominfo dan para *stakeholders* sudah melakukan antisipasi untuk meminimalisir dampak lonjakan trafik komunikasi selama mudik.

Arus mudik lebaran tahun ini, lalu lintas atau trafik layanan telekomunikasi diperkirakan meningkat antara 11% sampai dengan 36%. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar di antara 10% sampai dengan 20%.

Menurut Dirjen Ismail, Kementerian Kominfo telah menerima laporan dari opsel yang beroperasi di Indonesia terkait dengan layanan yang disiapkan selama arus mudik, yakni memastikan trafik telekomunikasi dan pendirian posko layanan telekomunikasi.

“Untuk tahun ini kita perkirakan lonjakan itu bisa mencapai angka 11% s.d. 36% dari normal, kalau di tahun-tahun sebelumnya bahkan sebelum Covid-19 kisaran di angka sekitar 10% s.d. 20%. Jadi perkiraan lonjakan trafik dari kondisi normal dan ini bukan angka yang kecil kalau 36%, berarti lebih dari seperempat dari kapasitas, maka kapasitas harus betul-betul ditingkatkan. Jadi semua operator besar



Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail menyatakan telah melakukan koordinasi dengan penyelenggara layanan telekomunikasi seluler atau operator seluler untuk mengantisipasi peningkatan trafik layanan telekomunikasi selama arus mudik.

“Dengan lonjakan trafik arus mudik berarti akan sejalan dengan lonjakan trafik telekomunikasi, jadi dari dunia pertelekomunikasian dan seluruh stakeholders ini memang betul-betul harus mempersiapkan diri dengan baik akibat lonjakan arus mudik ini,” ungkapnya dalam *Podcast TokTok Kominfo Eps Mudik Lebaran 2023* yang ditayangkan dari Jakarta Pusat, Selasa (18/04/2023).

telekomunikasi di Indonesia meningkatkan kapasitas dengan jumlah yang cukup fantastis,” jelasnya.

Plt. Dirjen PPI Kementerian Kominfo menjelaskan untuk Telkom Group telah menyiapkan kapasitas layanan telekomunikasi sebesar 395 ribu *giga bytes per second* (Gbps) dan 69 posko layanan telekomunikasi. Sedangkan untuk Telkomsel yang menangani layanan trafik internet di kisaran 12.590 Gbps dan 127 posko.

“Indosat juga akan mengantisipasi lonjakan ini sampai dengan kapasitas 7.273 Gbps dan akan menyiapkan posko nasional dengan model operasi digital, termasuk pemanfaatan *artificial intelligence* dan otomasi di berbagai posko yang disiapkan di Indosat,” tuturnya.

Sementara untuk kapasitas yang disiapkan oleh XL Axiata dilaporkan mencapai 6.200 Gbps dengan seribu personil yang *standby* dalam rangka mengantisipasi arus mudik.

"Untuk Smartfren mereka akan menyiapkan sampai dengan 400 Gbps dengan empat posko mudik tersebar di seluruh Indonesia. Jadi, itu secara garis besar kalau kita lihat dari sisi kapasitas," ujarnya.

Menurut Dirjen Ismail, Kementerian Kominfo juga telah melakukan koordinasi dengan seluruh opsel untuk mengantisipasi cakupan wilayah atau *coverage* di lokasi-lokasi yang padat ketika arus mudik lebaran.

"Harus ada *coverage* baru terutama di daerah-daerah yang padatnya melonjaknya terbatas, misalnya di *rest area* seperti tol perlu disiapkan *mobile combat* BTS (*Base Transceiver Station*). Jadi bukan BTS yang stasioner yang sudah ada, tapi khusus untuk lonjakan di daerah-daerah yang melonjak secara sesaat kita perlu siapkan *mobile combat* termasuk daerah wisata, daerah *rest area* di tol, kemudian daerah-daerah pemberhentian kunjungan pusat-pusat transportasi mal dan sebagainya," jelasnya.

Dirjen Ismail juga menjelaskan perlu adanya *drive test* untuk memastikan bahwa rencana-rencana tersebut berjalan dengan baik. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerjunkan tim yang bertugas melakukan pengujian kualitas layanan telekomunikasi di berbagai titik di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Selain itu pihaknya juga memberikan atensi lebih di jalur mudik utama yang berada di Pantai Utara Jawa (Pantura) dan daerah-daerah yang berada di sepanjang jalur mudik wilayah selatan agar tidak ada masyarakat yang sampai tidak bisa berkomunikasi meski berada di perjalanan.

Penting untuk menjaga silaturahmi para pemudik sehingga bisa berbagi kabar selama perjalanan mudik dengan keluarga di kota tujuan. Selain itu juga untuk mengantisipasi ancaman tindak pidana kejahatan di jalur-jalur mudik serta untuk memastikan keselamatan dan kesehatan akan disiapkan posko-posko yang beroperasi nonstop di sepanjang jalur mudik.

Kementerian Kominfo bersinergi dengan Kementerian Perhubungan untuk mendukung posko-posko nasional. "Kita akan bersatu padu dengan Kementerian Perhubungan, termasuk dalam hal *call center*," ungkap Pak Ismail.

Mengenai peningkatan kapasitas jaringan di beberapa titik menggunakan *Mobile Combat BTS*. *Mobile Combat BTS* merupakan sebuah stasiun pemancar dan penerima seluler yang dikemas dalam sebuah unit yang ringkas untuk memudahkan instalasi, pemeliharaan dan fleksibilitas lokasi karena dapat berpindah-pindah dengan mudah. *Mobile Combat BTS* merupakan salah satu solusi terbaik untuk menjaga kualitas jaringan ketika ada lonjakan trafik di daerah-daerah yang bersifat sementara.



“  
...di rest area  
seperti tol perlu  
disiapkan mobile  
combat BTS (*Base  
Transceiver Station*)

BTS yang diletakkan di atas mobil ini bisa bergerak mengikuti lonjakan kebutuhan jaringan di suatu area. "Jadi ini memudahkan kalau misalnya operator melihat lonjakan tinggi di titik tertentu, posisinya bisa bergerak ke arah itu," jelas Pak Ismail.

"Jadi pada prinsipnya jaringan telekomunikasi itu juga sejalan dengan trafik orang. Kalau orangnya banyak berkumpul di satu tempat dan biasanya di kota besar maka trafik di sana itu prioritas," ujar Ismail

"Tapi bukan berarti kita meninggalkan kota sedang dan kota kecil seperti saya sampaikan tadi kita juga berharap silaturahmi dan sebagainya itu bisa dilakukan melalui dunia digital. Jadi tidak tidak semua warga masyarakat itu bisa berkumpul secara fisik. Walaupun mungkin jumlahnya akan meningkat pesat. Tapi banyak juga masyarakat kita saudara-saudara kita yang tidak bisa datang secara fisik dan orang-orang yang ingin dihubungi tidak semua di kota besar," tambah Ismail.

Dengan adanya monitoring kualitas layanan komunikasi baik yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo maupun para operator seluler sebagai stakeholder dapat meminimalisir terjadinya gangguan komunikasi saat mudik.

## “...kota sedang dan kota kecil juga harus menjadi fokus dalam persiapan infrastruktur telekomunikasi

Menurut Dirjen Ismail, tidak semua orang memiliki keleluasaan untuk berkumpul secara fisik di momen ini, apalagi setelah dua tahun absennya tradisi mudik karena pandemi COVID-19.

"Jadi tidak semua warga masyarakat itu bisa berkumpul secara fisik. Walaupun mungkin jumlahnya akan meningkat pesat," ujar Dirjen Ismail. Menurutnya, banyak masyarakat kita, saudara-saudara kita, yang tidak bisa datang secara fisik. "Orang-orang yang ingin dihubungi tidak semua di kota besar. Adanya juga kadang-kadang nenek-kakek, kemudian keluarga-keluarga jauh kita dan sebagainya, itu ada di kota-kota kecil."

Dirjen Ismail menekankan bahwa kota-kota sedang dan kota kecil juga harus menjadi fokus dalam persiapan infrastruktur telekomunikasi

menjelang mudik. "Nah, maka oleh karena itu, persiapan untuk mengantisipasi arus mudik ini juga berlaku di kota-kota sedang dan kota kecil itu. Setidaknya untuk membantu terjadinya komunikasi secara digital itu," tambahnya.

Mengingat keterbatasan ini, Dirjen Ismail berpendapat bahwa komunikasi digital bisa menjadi solusi yang efektif untuk tetap menghubungkan keluarga yang terpisah oleh jarak. "Syukur bisa dilakukan secara *video call*, jadi komunikasinya dengan video atau setidaknya bisa dengan *voice*, dan lebih ini dengan data itu."

Dirjen Ismail juga menguraikan tentang penggunaan perangkat untuk akses *mobile* dan opsi *fixed line*. "Ya, untuk *mobile* biasanya menggunakan perangkat seperti HP, laptop, atau tablet. Karena itu menggunakan radio frekuensi sebagai sarana transmisinya. Tapi untuk di rumah-rumah biasanya ada opsi juga menggunakan kabel optik," terangnya.

Dalam konteks ini, kabel optik menjadi sangat penting, tidak hanya untuk akses tetapi juga sebagai jaringan utama yang menghubungkan kota-kota besar, antar kota, dan antar provinsi. "Kabel optik itu juga berjenjang, baik tidak hanya di sisi akses tapi yang utamanya adalah menghubungkan kota-kota besar, menghubungkan antar kota, *intercity*, dan inter provinsi dan seterusnya," kata Dirjen Ismail.



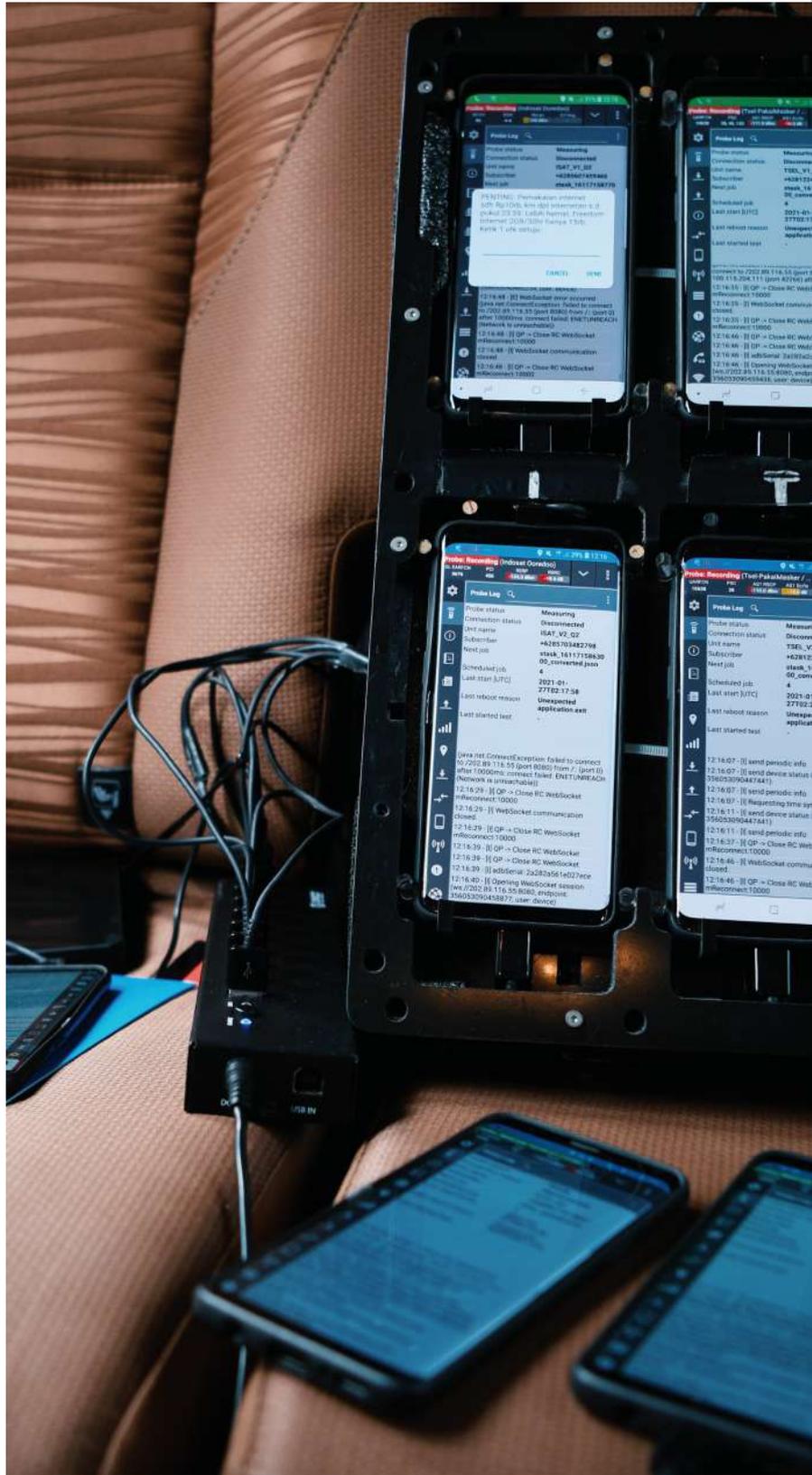
Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan, Dirjen Ismail menekankan bahwa tidak semua daerah bisa di-cover oleh kabel optik. Di daerah terpencil atau daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), solusi yang diandalkan adalah satelit. "Jadi ini opsi berikutnya ketika kita berada di pelosok-pelosok, daerah 3T dan sebagainya. Itu maka andalan kita adalah menggunakan satelit," ungkapnya.

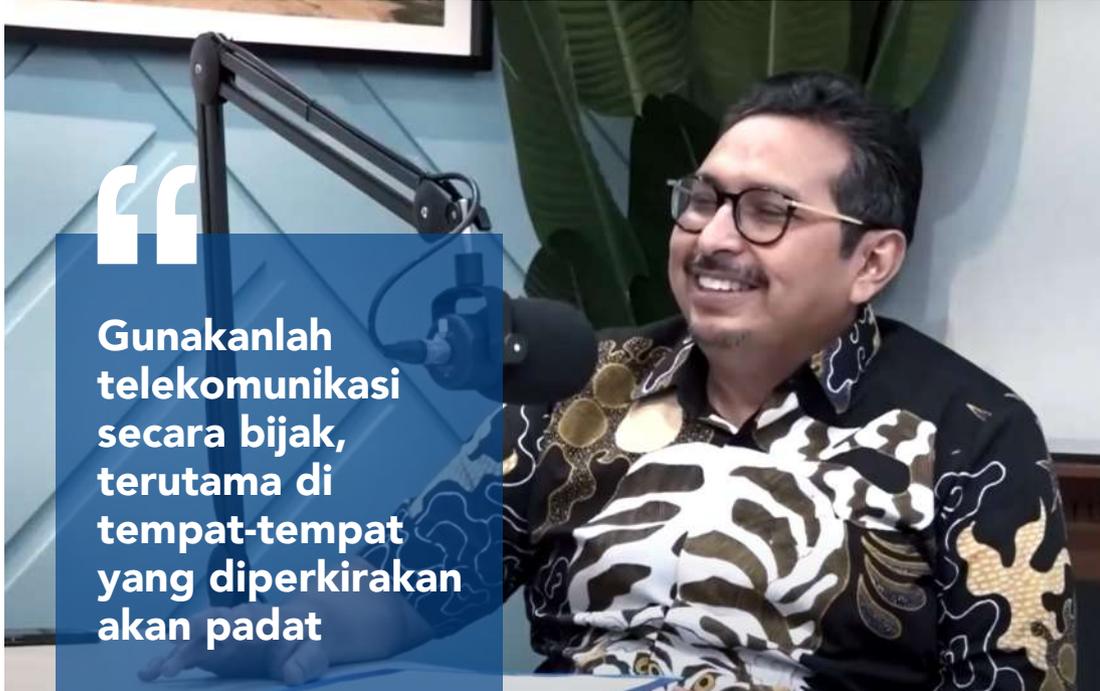
Dirjen Ismail menambahkan bahwa solusi konektivitas di Indonesia adalah komplementer antara fiber optik, radio *terrestrial microwave*, dan satelit. "Jadi itu komplementer, ya, antara fiber optik, kemudian radio *terrestrial microwave* juga satelit itu adalah tiga sarana transmisi utama yang ada di Indonesia," pungkasnya.

"Kerja kita dalam memastikan komunikasi mudik lancar tidak hanya dari Kominfo sendiri, tetapi ada banyak kerjasama dengan *stakeholders* lain, seperti operator," kata Dirjen Ismail. "Ini adalah pekerjaan yang melibatkan banyak pihak."

Dirjen Ismail menjelaskan bahwa timnya sudah melakukan pemantauan dua minggu sebelum mudik dan akan terus melakukannya hingga pasca Arus Balik. "Rangkaian mudik itu bukan cuma perangnya tapi pulangnya juga. Jadi, kita akan terus memantau dan mensupport itu," terangnya.

Ia juga menekankan bahwa memastikan kelancaran mudik adalah pekerjaan yang melibatkan banyak pihak, bukan hanya Kominfo. "Ini bukan pekerjaan Kominfo sendiri," ungkapnya. "Kominfo mengucapkan apresiasi karena ini bukan pekerjaan yang sederhana dan bukan pekerjaan baru tahun ini saja. Kita sudah bertahun-tahun melaksanakannya."





“

Gunakanlah telekomunikasi secara bijak, terutama di tempat-tempat yang diperkirakan akan padat

## Gunakan Telekomunikasi dengan Bijak

Setelah dua tahun lamanya pandemi COVID-19 membatasi pergerakan dan memaksa banyak orang untuk menunda mudik, situasi kini mulai kembali normal. Dengan dicabutnya PPKM, tentu akan terjadi lonjakan jumlah yang jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun, lonjakan tersebut tak lepas dari tantangan, terutama bagi infrastruktur telekomunikasi yang harus menampung kebutuhan komunikasi yang semakin meningkat.

Dirjen Ismail dalam Podcast TokTok Kominfo Eps Mudik Lebaran 2023 memberikan petunjuk penting bagi masyarakat yang akan melakukan mudik. Gunakanlah telekomunikasi secara bijak, terutama di tempat-tempat yang diperkirakan akan padat. Salah satunya dengan memprioritaskan keperluan mendesak dan produktif. Dengan melakukan hal tersebut kita tidak hanya membantu diri sendiri tetapi juga masyarakat luas untuk tetap terhubung di momen yang sangat penting ini.

"Jadi kebijakan kita itu, tolonglah melakukan komunikasi dengan bijak. Artinya tidak usahlah terlalu memaksakan misalnya akses yang tidak perlu pada jam-jam atau kondisi yang sedang di daerah yang sangat *crowded*," ujar Dirjen Ismail.

Sebagai contoh, beliau menyebut tentang orang-orang yang memaksakan untuk nonton *live* atau YouTube saat berada di *rest area*. "Mungkin kita bisa berhenti sejenak karena kita berpikir saudara-saudara kita di area itu juga sedang sama-sama memerlukan akses."

Ia juga menambahkan, "Jadi kita gunakan memanfaatkan kuota kita itu di hal-hal yang lebih produktif. Itu yang kita ingin, berkabar, komunikasi *emergency* dan sebagainya. Tapi yang sifatnya *entertaining* itu kan bisa kita tunda."

Dirjen Ismail menyarankan, setelah sampai di tujuan dan memiliki akses ke jaringan yang lebih stabil seperti fiber optik maupun WiFi, masyarakat bisa lebih leluasa untuk menikmati konten hiburan. "Nanti kalau kita sudah sampai di tujuan, kita bisa lebih leluasa untuk yang sifatnya *entertaining*," katanya.

Selain itu pihaknya juga sedang mengusahakan ada peningkatan kecepatan hingga 20% selama arus mudik dan arus balik. Dirjen Ismail menuturkan, "Kita sekarang sedang mengupayakan agar kecepatannya berbeda ya. Jadi ada peningkatan kecepatan karena bagi masyarakat itu sekarang itu internet itu sebuah kebutuhan pokok ya jadi sangat *demanding*, apalagi adik-adik kita generasi milenial-generasi Z boleh dibilang tidak pernah lepas dari gadgetnya."

Menurut Dirjen, target untuk tahun ini adalah meningkatkan kecepatan *download* menjadi antara 36-50 Megabit per detik (Mbps) dan kecepatan upload antara 20-27 Mbps. "Ini sudah meningkat kisaran 20% dari rata-rata arus mudik pada tahun yang sebelumnya," jelasnya.

Dengan peningkatan ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan mudik yang lebih nyaman dan lancar, terutama dalam komunikasi. "Wah ada peningkatan dan akhirnya nanti ketika kita mudik nyaman aman sampai di rumah dan komunikasi pun bisa terus lancar nggak putus sampai dengan tiba di rumah nenek rumah kakek," ucap Dirjen Ismail

Menurut Dirjen Ismail, saat berada di area yang ramai seperti *rest area*, lebih baik memprioritaskan penggunaan internet untuk keperluan yang lebih esensial. "Lebih baik kurangi dulu ya, untuk yang lebih ke esensial untuk komunikasi telepon atau mungkin *chat*," saran Dirjen.

Dirjen Ismail juga mengingatkan tentang risiko penipuan yang sering kali meningkat selama arus mudik. "Harus waspada terhadap iklan-iklan atau aplikasi-aplikasi yang berbau layanan-layanan yang tidak dikenal," tuturnya. Menurutnya, sebelum membuka tautan atau mengunduh aplikasi, penting untuk memastikan bahwa sumbernya terpercaya.

Lebih lanjut, Dirjen menambahkan, "Untuk pengguna Android, aplikasi dengan ekstensi APK bisa sangat berbahaya, terutama jika anda adalah pengguna layanan *mobile banking*. Maka bijaklah dalam memilih dan mengklik."





Dirjen Ismail juga menyarankan untuk mempersiapkan informasi-informasi penting sebelum mudik. "Siapkan nomor-nomor posko penting ya, untuk *rest area*, untuk BBM, dan untuk polisi," ungkapnya. Menurutnya, informasi ini penting untuk dipegang oleh masing-masing orang agar bisa sigap dalam kondisi darurat.

"Jangan sampai kita *stuck* di dalam satu lingkungan tertentu yang kemudian secara transportasi sudah *stuck* dan telekomunikasinya juga *stuck*," peringatan dari Dirjen. Untuk itu, ia menyarankan untuk memaksimalkan penggunaan teknologi yang ada, termasuk *download* peta *offline*. "Jadi ketika mungkin ada perpindahan posisi kalian dan sinyalnya agak terganggu, kalian sudah ada menyimpan *offline* peta kalian dan akhirnya bisa mudah untuk mencari alternatif rute lain."

Dirjen Ismail mengajak semua pihak, mulai dari bapak, ibu, saudara-saudara, hingga adik-adik, untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum melaksanakan mudik. "Menjaga kesehatan dan memeriksa kendaraan adalah hal yang sangat penting," ujarnya. Ini adalah dasar yang perlu diperhatikan oleh siapa saja yang akan melakukan perjalanan jauh, lebih-lebih di tengah situasi yang masih memerlukan kehati-hatian.

Selain itu, Dirjen juga menekankan pentingnya memanfaatkan sistem telekomunikasi dengan bijak. "Pemanfaatannya digunakan pada saat, pada tempatnya, pada keperluannya," kata Dirjen. Di era digital ini, telekomunikasi memang telah menjadi salah satu kebutuhan pokok yang sulit untuk dihindari. Namun, kebijakan dalam menggunakannya tetap perlu ditekankan, terutama di tengah keramaian dan banyaknya keperluan saat mudik.

Dirjen juga mengingatkan untuk menghindari konten-konten negatif yang bisa mengganggu atau merusak suasana Idul Fitri. "Idul Fitri adalah momen yang sakral, yang seharusnya dijaga oleh kita semua," imbuhnya. Menjaga suasana hati dan pikiran tetap positif tentu akan berdampak pada kualitas perayaan Idul Fitri kita.

## E-book Mudik Aman Berkesan 2023

Sebagai salah satu upaya untuk membuat mudik aman, nyaman dan berkesan, selain memastikan jaringan telekomunikasi dapat digunakan selama mudik, Kementerian Kominfo juga meluncurkan e-book panduan perjalanan mudik yang bisa diakses secara gratis oleh masyarakat pada tautan [s.id/mudiklebaran](http://s.id/mudiklebaran).

"E-book mudik 2023 ini sesungguhnya melanjutkan kerja tim komunikasi publik mudik tahun sebelumnya untuk memberikan panduan kepada masyarakat. Agar ketika melakukan mudik, bisa dengan nyaman, aman dan berkesan," ujar Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika



“

Dalam buku ini ada berbagai informasi, misalnya lokasi pom bensin terdekat, rumah makan, posko kesehatan dan berbagai lokasi lainnya untuk beristirahat

“Untuk itu masyarakat perlu mendapat penjelasan. Tujuannya apa? Pemudik akan bisa menentukan, misalnya kapan dan melalui jalur mana saat akan mudik. Menghindari penumpukan. Dalam buku ini ada berbagai informasi, misalnya lokasi pom bensin terdekat, rumah makan, posko kesehatan dan berbagai lokasi lainnya untuk beristirahat,” katanya.

Kelebihan lain adalah isi dan substansi buku yang terus *ter-update*. Selain itu peta lokasi kuliner juga tersaji di dalamnya. Atau cukup membuka tautan [s.id/mudiklebaran](https://s.id/mudiklebaran) pemudik dapat dengan mudah menentukan dimana akan beristirahat, sambil tentunya juga bisa menemukan lokasi kuliner yang memanjakan lidah, sebelum kemudian melanjutkan perjalanan.

“Buku ini adalah teman bacaan selama perjalanan. Karena di dalamnya juga ada informasi terkait latar belakang, sejarah dan berbagai hal menarik tentang tradisi mudik di Indonesia,” kata Usman sembari menambahkan bahwa pemudik yang menggunakan kendaraan listrik pun tidak perlu khawatir karena informasi keberadaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) juga disajikan dalam buku elektronik “Mudik Aman Berkesan 2023”.

“Kelebihan lain adalah isi dan substansi buku yang terus *ter-update*. Selain itu peta lokasi kuliner juga tersaji di dalamnya.”



Tenaga Ahli Menteri Perhubungan, Thontowi Djauhari di saat terpisah menambahkan bahwa *e-book* ini sangat bermanfaat dan membantu masyarakat untuk merencanakan mudik yang aman dan nyaman. “Menjadi panduan, baik yang akan mudik lewat darat, laut, maupun udara,” katanya.

Begitu pula bagi mereka yang hendak mudik menggunakan angkutan umum. Tonthowi mengatakan jika buku “Mudik Aman Berkesan 2023” mengulas secara detail penjelasan kelaikan bus yang akan ditumpangi. Informasi ini tentunya penting bagi pemudik karena terkait keselamatan selama perjalanan.

“...di dalamnya juga ada informasi terkait latar belakang, sejarah dan berbagai hal menarik tentang tradisi mudik di Indonesia.”

“Jadi, yang mau mudik, *e-book* ini layak koleksi. Apalagi ada referensi kuliner di jalur mudik juga,” katanya.

“Informasi ini tentu akan memudahkan masyarakat menentukan waktu untuk mudik atau balik nantinya. Lebih penting lagi adalah dalam buku terdapat informasi *call center* ketika pemudik kehabisan bahan bakar, disamping informasi lokasi SPKLU terdekat bagi pengguna kendaraan listrik,” ujar Thontowi.

Ada pula informasi lokasi *rest area*, cara mengakses program-program mudik gratis, posko mudik dan kesehatan serta nomor-nomor penting yang bisa dihubungi setiap saat.



## Komitmen Menjaga Kualitas Sepanjang Tahun

Bukan hanya dilakukan pada momen-momen tertentu saja, mempertahankan QoS merupakan hal yang dilakukan secara terus-menerus untuk dapat memenuhi kebutuhan akan akses internet berkualitas yang kini semakin merata menjadi kebutuhan dasar bahkan hingga masyarakat di pedesaan.

Komitmen dan keseriusan Kominfo dalam menjaga QoS direalisasikan melalui berbagai cara seperti penentuan regulasi, Kegiatan Bimtek, pelatihan bagi masyarakat, dan kegiatan-kegiatan teknis lainnya.

Visi untuk dapat menjadikan akses informasi menjangkau daerah terpencil atau daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) diwujudkan melalui ekspansi pembangunan infrastruktur sebagaimana yang telah dilakukan pemerintah pada tahun 2022 dengan menyiapkan Rp25 triliun setahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna menuntaskan infrastruktur digital di daerah 3T.



Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) siap mendorong mempercepat pembangunan infrastruktur digital di Indonesia.

“Saat ini pemerintah mengambil posisi untuk melakukan pembangunan, dengan memiliki APBN Rp25 triliun anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah selama satu tahun untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah 3T,” ucap Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Ismail, saat menjadi narasumber pada acara Digital Transformation Indonesia, Kamis (4/8/2022).

Pemerintah juga mendorong kebijakan untuk melakukan efisiensi dengan skema *sharing*. Pemerintah membuka seluas-luasnya regulasi agar operator dapat memilih antara kolaborasi, *sharing*, atau kompetisi.

Begitu juga dengan manajemen yang baik terhadap spektrum frekuensi radio (SFR) diyakini sebagai langkah paling efektif dalam penyelenggaraan internet yang nyaman bagi masyarakat. Semua pemangku kepentingan harus bersinergi dalam penyelenggaraan internet.

# Muhammad Alwi Dahlan

Bapak komunikasi Indonesia



Muhammad Alwi Dahlan adalah seorang tokoh politik Indonesia yang juga dikenal sebagai bapak ilmu komunikasi Indonesia. Pria kelahiran Padang ini sukses menjadi orang pertama di Indonesia yang memiliki gelar doktor ilmu komunikasi. Padahal saat itu masih banyak orang yang belum begitu paham mengenai komunikasi massa. Bahkan pada masanya, bidang komunikasi adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan baru dari Amerika Serikat yang memiliki pengertian dan definisi luas dari ilmu jurnalistik serta publikasi yang berkiblat pada Jerman. Tak heran masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memahami ilmu ini. Hal tersebut lah yang membuatnya dijuluki sebagai pakar dan guru besar komunikasi massa.

Kegemaran menulis dan mengarang sudah terlihat sejak SMP. Pada usia 16 tahun dia sudah aktif mengarang, seperti cerita pendek di mingguan nasional Mimbar Indonesia dan majalah Kisah terbitan Jakarta. Saat masa SMP-nya di Bukittinggi, Alwi menerbitkan koran sekolahnya. Ia menjadi koresponden untuk majalah Siasat dan mengisi rubrik kebudayaan Gelanggang di majalah tersebut. Sewaktu SMA, Alwi menulis rangkaian reportase perjalanan kaki menjelajahi pedalaman Alas, Gayo, dan Aceh untuk Siasat. Ia juga aktif menulis dalam Zenith, sebuah majalah kebudayaan yang diterbitkan oleh Mimbar Indonesia.

Hal ini terus berlanjut saat ia berkuliah di Universitas Indonesia, Alwi Dahlan menghabiskan waktunya untuk menjadi aktivis di organisasi sosial dan bergabung dalam ikatan sarjana komunikasi Indonesia. Pada organisasi itu ia diberi kesempatan untuk menjadi ketua umum. Masih banyak organisasi lainnya yang ia ikuti seperti HIPIIS (Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial) dan PERHUMAS (Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia). Karena belum adanya jurusan ilmu komunikasi pada saat itu, Alwi Dahlan beserta teman-temannya menyalurkan bakat menuliskan di penerbit kampus dan forum mahasiswa sebelum akhirnya mendirikan sendiri Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia pada tahun 1958.

Ia berangkat ke AS pada 1958 sebelum sempat menyelesaikan studinya di Fakultas Ekonomi UI, karena diundang oleh Organisasi Nasional Mahasiswa AS (*US National Student Association*) dalam posisinya sebagai aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI). Pada tahun 1961 ia menyelesaikan studi S-1nya di American University, Washington, DC dan memperoleh gelar BA. Ia melanjutkan studinya ke Universitas Stanford dan mengambil gelar *Master of Arts* (MA) dalam bidang ilmu komunikasi pada 1962. Pada 1967 Alwi meraih gelar doktor dalam ilmu komunikasi dari Universitas Illinois di kota Urbana-Champaign, Amerika Serikat, dan menjadi orang Indonesia pertama yang memiliki gelar doktor dalam bidang tersebut.

## Penghargaan

17 Agustus 1994  
Penghargaan Bintang Jasa  
Utama oleh Presiden Soeharto



## Karir

1998  
Menteri Penerangan

1997  
Diangkat menjadi Guru Besar ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

1993-1998  
Kepala BP-7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)

1979-1993  
Asisten Menteri Negara bidang Kereserasian Kependudukan, Lingkungan, dan Kependudukan di Kementerian Lingkungan Hidup

Tak hanya aktif berkontribusi dalam dunia pemerintahan, Alwi Dahlan juga merintis beberapa bidang kegiatan yang pada waktu itu dianggap baru di Indonesia. Antara lain, menerbitkan mingguan Chas, sebuah berita berkala pertama yang tampil dalam bentuk tabloid. Lalu Alwi mendirikan Inscore (*Institute for Social, Commercial & Opinion Research*) Indonesia, sebuah lembaga riset masalah komersial dan pendapat umum swasta yang pertama. Begitu pula dengan Inscore Adcom, perusahaan jasa komunikasi total dan PR yang pertama di Indonesia.

“Pria kelahiran Padang ini sukses menjadi orang pertama di Indonesia yang memiliki gelar doktor ilmu komunikasi

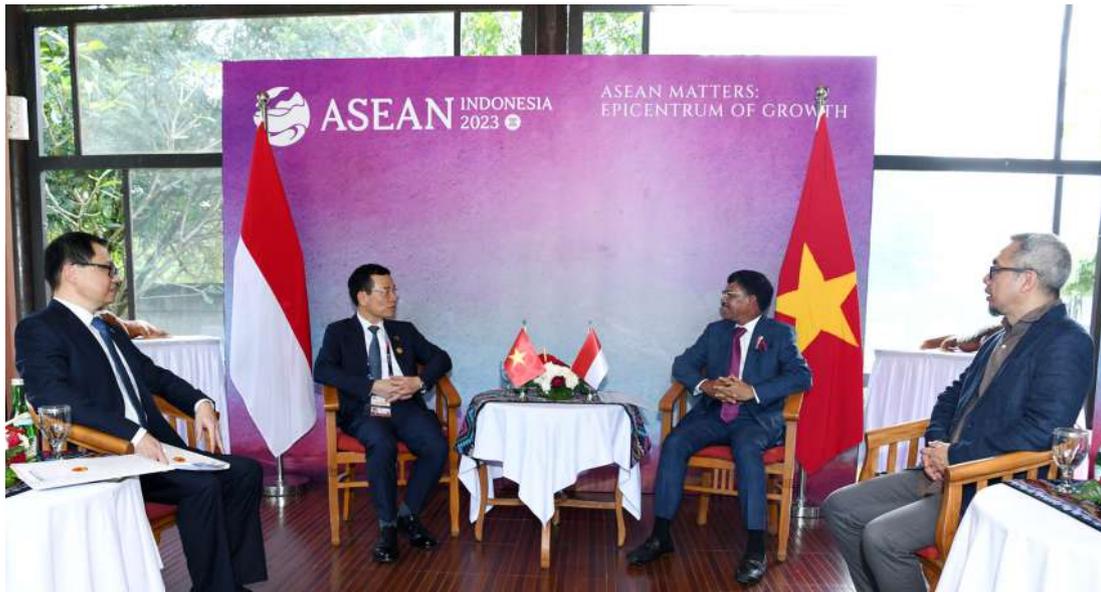
Selain sebagai dosen dan berkecimpung selama 20 tahun di lingkungan birokrasi pemerintahan, Alwi juga aktif dalam berbagai organisasi profesi. Di antaranya, ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) selama lebih 10 tahun sejak 1983; Ketua Umum Himpunan Indonesia untuk Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS) sejak 1984 sampai 1995; dan sebagai anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) selama 10 tahun sejak tahun 1984.

Indonesia dan Vietnam  
Jajaki Kerja Sama

# Pencegahan Konten Digital TPPO



Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi kasus yang marak terjadi terlebih pada era keterbukaan informasi dimana peredaran misinformasi sangatlah mudah tersebar. Hal ini tentunya menimbulkan banyak sekali dampak buruk yang menimpa korban kasus TPPO, terutama pada kasus yang terjadi pada level antar negara. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi salah satu isu penting yang masuk dalam pembahasan pertemuan sesi pleno KTT ke-42 ASEAN 2023.



Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengemukakan, TPPO adalah sebuah bentuk dari pelanggaran HAM berat yang memerlukan penanganan dan pencegahan secara serius, apalagi sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak.

Selain pemerintah Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan bahwa permasalahan TPPO juga mendapat perhatian dari negara-negara ASEAN. Sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun ini, menurut Mahfud, para negara anggota ASEAN meminta Indonesia mengambil posisi kepemimpinan untuk memberantas tindak perdagangan orang yang dianggap mengganggu kehidupan bernegara.

Para pemimpin ASEAN memiliki perhatian tinggi terhadap isu tersebut. Hal itu karena menurut catatan, kasus TPPO di kawasan semakin banyak dan terjadi melalui metode penipuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Indonesia pun berinisiatif mengajukan penguatan upaya bersama dalam pemberantasan tindak kejahatan dimaksud.

Pada tahun 2022, beredar berita mengenai Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipekerjakan sebagai *scammer* judi online di Kamboja. WNI yang tertipu dan bekerja di luar

“...negara anggota ASEAN meminta Indonesia mengambil posisi kepemimpinan memberantas tindak perdagangan orang

negeri tersebut bisa digolongkan sebagai korban TPPO. Kejadian ini dan kejadian serupa lainnya mendorong Indonesia mengajukan inisiatif penguatan upaya bersama dalam pemberantasan tindak kejahatan tersebut.

“Inisiatif Indonesia sebagai wujud upaya regional dalam penanganan TPPO akan dibahas dan dituangkan dalam *ASEAN Leaders’ Declaration on Combating TIP Caused by Abuse of Technology*,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, Senin (1/5/2023) di Jakarta.

Kompleksnya permasalahan TPPO, dikatakannya memerlukan upaya penanganan regional secara kolektif. Mulai dari tahapan deteksi, pencegahan, perlindungan, pemulangan, rehabilitasi dan mengatasi akar permasalahan.

## Sinergi Indonesia dan Vietnam

Indonesia dan Vietnam masing-masing merupakan negara dengan jumlah penduduk besar di kawasan ASEAN. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Indonesia dan Vietnam membuka kesempatan untuk melakukan kerja sama berkaitan dengan ruang digital dan digitalisasi.

Menkominfo menyatakan salah satu peluang yang dibahas berkaitan dengan penegakan hukum saat mendeteksi aktivitas ilegal dan tindakan kriminal dalam ruang digital. Salah satunya berkaitan dengan konten promosi digital berisi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Karena apa? (aktivitas) di *online* ini juga digunakan untuk promosi TPPO. Itu juga perlu

kita perhatikan bersama-sama. Kita sudah mempunyai sistem, yang perlu sekarang bagaimana koordinasi dan kolaborasi antara kedua kementerian Vietnam dan Indonesia dan kerja sama multilateral dan kerja sama bilateral di negara-negara ASEAN," jelasnya usai dengan Menteri Digital Vietnam Nguyen Manh Hung di Hotel Jayakarta, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (10/05/2023).

Menurut Menteri Johnny, Indonesia dan Vietnam mempunyai perspektif yang sama dalam pemanfaatan ruang digital dan digitalisasi. Menkominfo menyatakan kedua negara sama-sama memiliki komitmen menjaga ruang digital.

"Di Vietnam juga ada peralatan yang berkaitan dengan *surveillance system* dan *crawling system* yang memantau ruang digital, apakah ada tindakan-tindakan ilegal dan kriminal di dalam ruang digital. Vietnam sudah punya, Indonesia juga sudah punya saat ini," ujarnya.

Menteri Johnny menilai *surveillance system* yang telah dimiliki kedua negara semakin mempermudah hubungan kerja sama dengan menggandeng *platform* digital baik yang beroperasi di Indonesia maupun Vietnam.



“Yang perlu setelah di dalam ruang digital *surveillance system* ditemukan, dikoordinasikan baik dengan *platform* digital untuk *take down* dan dengan aparat penegak hukum untuk tindak lanjutnya. Saya kira selama ini sudah berjalan dengan baik, kalau itu tidak berjalan dengan baik kita nggak tahu TPPO di Myanmar misalnya yang terjadi saat ini. Nah, yang perlu sekarang justru meningkatkan kerja sama yang lebih efisien dan efektif,” tuturnya.

## MoU Bidang Keamanan Digital

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Vietnam akan menyusun *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk meningkatkan hubungan kerja sama kedua negara di sektor digital. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan payung hukum itu diharapkan akan memperkuat kerja sama dalam infrastruktur digital dan pemanfaatan ruang digital antarnegara.

“Indonesia dan Vietnam selama ini belum mempunyai payung kerja sama, sehingga tadi kami sepakati untuk membuat satu payung kerja sama dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Indonesia dan Vietnam yang berhubungan dengan pengembangan infrastruktur digital dan ruang digital” jelasnya usai pertemuan bilateral dengan Menteri Digital Vietnam Nguyen Manh Hung



di Hotel Jayakarta, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (10/05/2023).

Selain pengembangan infrastruktur digital, Indonesia-Vietnam juga akan menyusun MoU untuk pemanfaatan ruang digital untuk digital ekonomi hingga upaya bersama dalam menangani *cyber security* serta pencegahan penyebaran hoaks dan disinformasi.

“Ini penting sekali kita lakukan bersama-sama agar ruang digital itu bisa bermanfaat bagi masyarakat kita secara maksimal. *Combat fake news disinformation* tentu sejalan dengan hukum dan aturan atau yang disebut dengan *lawful interceptions* dan *lawful taking down*. Itu yang kami diskusikan,” tandas Menteri Johnny.

Menteri Nguyen Manh Hung menegaskan tindaklanjut dari hubungan kerja sama yang digagas bersama Menkominfo Johnny G. Plate itu akan menjadi daftar kemitraan terbaru antar kedua negara.



## Dukungan Percepatan Penanganan oleh Presiden

Pada hari Selasa, (30/05/2023), Presiden Joko Widodo juga menggelar rapat terbatas membahas mengenai permasalahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan akan melakukan restrukturisasi satuan tugas tim TPPO untuk segera mengambil langkah cepat dalam penanganan permasalahan tersebut.

“Presiden tadi menyatakan melakukan restrukturisasi satgas tim tindak pidana perdagangan orang, kemudian memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, kepolisian negara, TNI, dan aparat-aparat pemerintah yang lain itu bertindak cepat

dan hadir untuk ini,” ujar Menkopolkam Mahfud MD dalam keterangannya usai mengikuti rapat.

Selain itu, Presiden juga memerintahkan jajaran Kepolisian Republik Indonesia untuk menelusuri adanya dukungan bagi para penjahat perdagangan orang. Mahfud menegaskan bahwa negara tidak mendukung adanya TPPO di Tanah Air.

Menkopolkam melanjutkan, dalam rapat tersebut, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani telah melaporkan kepada Presiden bahwa jenazah warga Indonesia yang kembali karena TPPO dalam satu tahun mencapai lebih dari 1.900 orang.



**Presiden juga memerintahkan jajaran Kepolisian Republik Indonesia untuk menelusuri adanya dukungan bagi para penjahat perdagangan orang**

# Izin Komunikasi Radio Nelayan (IKRAN)

Inovasi Kominfo untuk  
Nelayan Tanah Air



Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki jumlah nelayan yang sangat besar dan memiliki kontribusi signifikan terhadap mata pencaharian dan ekonomi nasional. Isu interferensi yang sering ditimbulkan dari komunikasi radio nelayan pada aktivitas harian, kini bukan lagi halangan.

Dengan jumlah yang begitu banyak dan tersebar di seluruh perairan nusantara, nelayan di tanah air menggunakan berbagai metode dan perangkat dalam menjalankan kegiatannya. Satu hal yang pasti adalah meningkatnya kesadaran nelayan dalam menggunakan teknologi pada aktivitasnya, meskipun tingkat adopsi teknologi terbilang sangat beragam dikarenakan akses dan faktor lainnya.

Namun seiring pertumbuhan jumlah nelayan dan adopsi teknologi yang terus meningkat turut membawa industri perikanan Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah penggunaan frekuensi radio dalam keseharian aktivitas nelayan di laut. Isu yang menjadi tantangan terkait hal ini di antaranya:

## 01 Keterbatasan Alokasi Frekuensi

Karena banyaknya pengguna frekuensi radio di laut, terutama dalam situasi ramai seperti pelabuhan atau area penangkapan ikan yang bonafit, bisa terjadi tumpang tindih frekuensi yang mengganggu komunikasi yang efektif.

## 02 Kurangnya Edukasi tentang Komunikasi

Tidak semua nelayan memahami tata cara penggunaan frekuensi radio atau etika komunikasi di laut. Hal ini bisa menyebabkan kebingungan dalam berkomunikasi atau bahkan konflik verbal.

## 03 Pertumbuhan Lalu Lintas Radio

Semakin banyak kapal dan nelayan yang menggunakan frekuensi radio, semakin padat lalu lintas radio di perairan. Ini dapat menyebabkan hambatan dalam berkomunikasi atau penundaan dalam mendapatkan tanggapan.



# Inovasi Solusi Komunikasi Nelayan

Melihat urgensi dari hadirnya jaringan komunikasi yang tertib dan berkualitas Kementerian Koinfo menghadirkan inovasi baru bagi persoalan ini, yaitu dengan menghadirkan Izin Komunikasi Radio Nelayan (IKRAN) sebagai solusi komunikasi radio khusus bagi nelayan.

Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR) Kelas II Banda Aceh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Koinfo, Luthfi, di Gampong Jawa, Lampulo, Banda Aceh, Sabtu (18/03/2023), masalah interferensi yang ditimbulkan dari komunikasi radio nelayan, merupakan salah satu isu yang sering muncul sebagai dasar pelaksanaan sertifikasi bagi nelayan.



"Kominfo kerap menerima aduan dari negara lain terkait gangguan frekuensi radio penerbangan yang terindikasi berasal dari perangkat komunikasi nelayan di sejumlah perairan Indonesia," tuturnya.

Kabalmon Banda Aceh menjelaskan bahwa IKRAN ini merupakan inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo. IKRAN bisa dimiliki oleh nelayan, nahkoda, operator radio kapal, pemilik kapal, dan syahbandar.

"IKRAN dimaksudkan sebagai solusi komunikasi radio khusus bagi pelaku pelayaran yang membutuhkan frekuensi HF khusus Non-GMDSS untuk komunikasi kapal ke kapal, kapal ke pemilik ikan, serta kapal ke stasiun pantai. Perangkat radio yang digunakan wajib bersertifikat dari Ditjen SDPPI.

Masalah interferensi, ungkap Direktur Operasi Sumber Daya, menjadi persoalan rutin dalam satu dekade terakhir. Kemkominfo kerap menerima aduan dari administrasi internasional terkait gangguan frekuensi radio penerbangan yang terindikasi berasal dari perangkat komunikasi nelayan di sejumlah perairan Indonesia.

Atas persoalan tersebut, sejak 2019, Ditjen SDPPI melaksanakan intensifikasi Bimtek, baik LRC maupun *Short Range Certificate* (SRC) di 35 provinsi. Sekitar 85 Pelabuhan Perikanan dipilih sebagai lokasi edukasi penggunaan frekuensi dan tata cara komunikasi yang baik dan benar. "Masyarakat bisa mengikutinya secara gratis, dengan harapan nelayan dapat berkomunikasi secara baik dan benar, sehingga akan menekan kejadian interferensi," ucap Direktur Operasi Sumber Daya.

## Bimbingan Teknis dan Penerbitan IKRAN

Bimtek pada esensinya merupakan pembekalan kecakapan sebagai operator radio maritim, agar mampu mengoperasikan perangkat radio pada frekuensi kerja VHF, MF hingga HF dengan jangkauan hingga 150 nautical miles atau sekitar 300 km dari stasiun pantai terdekat.

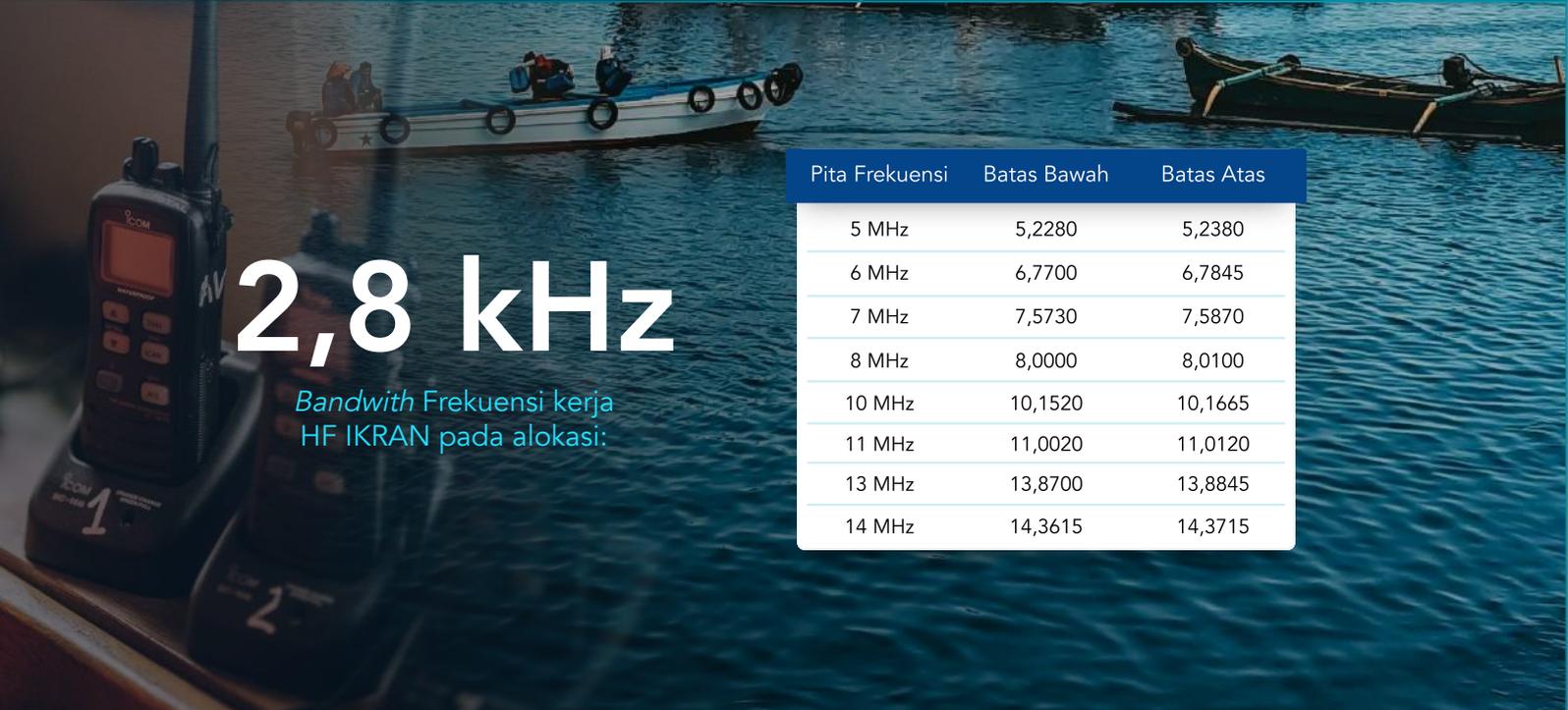
Hal ini sesuai ketentuan internasional, yakni *ITU Radio Regulation* sebagai bagian dari ekosistem keselamatan jiwa di laut. Diharapkan, setelah mengikuti Bimtek, para peserta dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam penggunaan frekuensi radio serta tata cara komunikasi sesuai kaidah dan ketentuan maritim.

Sedangkan IKRAN, sebagai inovasi terbaru Ditjen SDPPI, dimaksudkan sebagai solusi komunikasi radio khusus bagi pelaku pelayaran yang membutuhkan frekuensi HF khusus Non-GMDSS untuk komunikasi kapal ke kapal, kapal ke pemilik ikan, serta kapal ke stasiun pantai. Perangkat radio yang digunakan wajib bersertifikat dari Ditjen SDPPI.

IKRAN berlaku satu tahun (masa ujicoba), diberikan bagi peserta yang berhasil lulus dalam Bimbingan Teknis Sertifikat Jarak Jangkauan Jauh (SJJJ) atau *Long Range Certificate* (LRC), kegiatan kolaborasi Direktorat Operasi Sumber Daya bersama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas I DKI Jakarta dan Balai Monitor SFR Kelas I Bandung.

"Penerbitan IKRAN bersifat strategis bagi masyarakat nelayan beserta ekosistem pendukungnya, karena dapat menyelesaikan masalah aduan interferensi," ujar Direktur Operasi Sumber Daya Dwi Handoko, Hari Rabu (19/10/2022), saat memberikan sambutan pelaksanaan Bimtek LRC.

“...sebagai solusi komunikasi radio khusus bagi pelaku pelayaran yang membutuhkan frekuensi HF khusus Non-GMDSS



# 2,8 kHz

Bandwith Frekuensi kerja  
HF IKRAN pada alokasi:

Pita Frekuensi	Batas Bawah	Batas Atas
5 MHz	5,2280	5,2380
6 MHz	6,7700	6,7845
7 MHz	7,5730	7,5870
8 MHz	8,0000	8,0100
10 MHz	10,1520	10,1665
11 MHz	11,0020	11,0120
13 MHz	13,8700	13,8845
14 MHz	14,3615	14,3715

## Alur Pengajuan IKRAN

Untuk mendapatkan IKRAN nelayan perlu melakukan pengajuan yang kini bisa dilakukan secara online. Pengajuan ini bersifat gratis.

[komin.fo/ikran](http://komin.fo/ikran)

### 01 Membuat Permohonan

Menginput data pemohon melalui Google Form. Pemohon diwajibkan memiliki email yang disarankan memiliki nama pribadi, bukan nama orang lain.

## 02 Melengkapi Dokumen Permohonan

Mengunggah dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan

Pas foto berwarna berlatar belakang putih

Scan KTP

Scan KUSUKA/Surat Pernyataan HNSI

Scan LRC. Boks Kartu Pelaku Usaha Kelautan HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia)

*Sertifikat LRC diperoleh dari Bimbingan Teknis Sertifikat Jarak Jangka Jauh*

## 03 Verifikasi Permohonan

Petugas admin melakukan verifikasi. Jika tertolak, pemohon harus menginput ulang dan/atau menginput data yang belum sesuai dengan verifikasi admin.

## 04 Verifikasi Disetujui

Saat verifikasi disetujui, pemohon akan melakukan *approval* dengan penandatanganan IKRAN secara elektronik.

## 05 IKRAN Terbit

IKRAN terbit dalam bentuk elektronik dan didistribusikan melalui email yang terdaftar dan melalui UPT (melalui Google Drive).

## 06 Menerima IKRAN

Pemohon menerima IKRAN dari UPT atau dapat mengunduh melalui email.



## Hari Pendidikan Nasional Memerdekakan Pendidikan. Menggapai Impian.

Setiap tahun, pada tanggal 2 Mei, Indonesia merayakan Hari Pendidikan Nasional. Hari ini dipilih dalam rangka memperingati kelahiran Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan yang berjasa besar dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Meskipun kondisi terlihat membaik dan kegiatan sekolah berangsur memasuki aktivitas pembelajaran normal, namun Indonesia masih dalam status pandemi COVID-19 yang telah mengubah banyak aspek kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendidikan.

Tema Hari Pendidikan Nasional 2023 adalah "Bergerak Bersama Semarakkan Merdeka Belajar". Sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 12811/MPK.A/TU.02.03/2023 tentang Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2023 oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Selain itu, bulan Mei 2023 juga dicanangkan sebagai bulan Merdeka Belajar seiring dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional 2023.



Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan siswa SD secara daring telah menjadi pemandangan lazim dalam dua tahun belakangan. Adaptasi terhadap perubahan cara belajar yang memerlukan dukungan penuh orang tua ini kini menghasilkan pola pelajar yang baru. Mungkin seperti para pelajar yang merasa mencatat dengan *keyboard* lebih mudah dari mencatat dengan pulpen.



Hari Pendidikan Nasional umumnya dirayakan dengan kegiatan upacara terutama pada lingkungan pendidikan untuk menjaga dan kembali mengingatkan arti penting pendidikan dan tanggung jawab untuk mengembangkan diri sendiri.

Kegiatan belajar secara *online* memang memiliki banyak tantangan dan di sisi lain juga menghadirkan banyak peluang, seperti maraknya aplikasi, *workshop*, dan kelas-kelas *online* yang awalnya terasa asing kini telah seringkali menjadi pilihan utama sebagai jalan menuntut ilmu.



## Hari Kebangkitan Nasional

# "Semangat Untuk Bangkit"



Sejarah peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) tanggal 20 Mei tak lepas dari berdirinya organisasi Boedi Oetomo atau Budi Utomo. Mengutip dari Kemdikbud, Budi Utomo merupakan organisasi pemuda yang dicetuskan pada 20 Mei 1908 silam.

Keberadaan organisasi Budi Utomo telah mengubah perjuangan bangsa Indonesia yang awalnya dilakukan secara fisik menjadi perjuangan secara diplomatis. Budi Utomo juga mengubah perjuangan yang bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Budi Utomo turut membangkitkan semangat nasional rakyat Indonesia untuk melawan penjajahan demi mencapai kemerdekaan.

Sedangkan latar belakang penetapan 20 Mei sebagai peringatan Hari Kebangkitan Nasional bermula dari usulan Presiden RI pertama Soekarno. Pada 1948, Presiden Soekarno menetapkan tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 sebagai Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas).

## Tema Hari Kebangkitan Nasional 2023

Tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-115 tahun 2023 telah diatur dalam Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Menkominfo RI) Nomor 241/M.KOMINFO/HM.04.01/05/2023. Dimana ditetapkan bahwa tema Hari Kebangkitan Nasional 2023 adalah "Semangat Untuk Bangkit".

Pemilihan tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-115 tahun 2023 tersebut memiliki makna agar Hari Kebangkitan Nasional dapat melambungkan nilai-nilai semangat dan kekuatan untuk bangkit untuk menuju masa depan Indonesia yang lebih baik.

## Media Digital Sebagai Wadah Perjuangan Modern

Berbeda dengan zaman Boedi Oetomo, kehadiran teknologi kini menjadi tantangan sekaligus peluang yang dimiliki oleh para penerus bangsa.

Untuk itu, tantangan bangsa Indonesia saat ini adalah memanfaatkan teknologi untuk membangun kepercayaan, kerja sama, serta membangun sinergi dengan semangat yang sama besarnya.

Hal ini berlaku untuk seluruh komponen masyarakat, baik dari masyarakat umum dan pemerintahan.

Jika dahulu semangat dan pemikiran para anggota Budi Utomo menjadi pemicu perjuangan untuk melepaskan bangsa ini dari penjajahan, kini perjuangan melalui pemikiran yang kritis dan membangun dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui jejaring media sosial. Membangun diskusi yang membuka wawasan bahkan hingga memberi dampak langsung seperti pergerakan komunitas yang membawa manfaat bagi banyak orang.

Mengutip perkataan dr. Soetomo yang menyatakan "Generasi yang mau berjuang untuk kemandirian bangsanya adalah generasi yang mencintai generasi penerusnya dan mencintai tanah airnya," Plt. Menkominfo Mahfud MD mengajak seluruh anak bangsa mempertahankan semangat kebangkitan nasional dalam sambutan Upacara Peringatan ke-115 Harkitnas di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (22/05/2023).

"Dengan semangat yang sama pula, kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus mempertahankan bara api semangat kebangkitan nasional. Sembari merapatkan barisan perjuangan kita dengan menunjukkan kerja keras, kerja cerdas, juga kerja bersama demi kemandirian dan kemajuan bangsa yang berkelanjutan," ungkapnya.

Menurut Plt. Menkominfo Mahfud MD, kesuksesan acara internasional Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 dan Keketuaan Indonesia dalam Forum ASEAN 2022 menunjukkan kebangkitan nasional yang telah dilakukan pemerintah dan masyarakat.



## Berkreasi untuk Berakselerasi

Hari Kebangkitan Nasional patut dijadikan momentum untuk mengaktualisasi diri di tengah tingginya persaingan dan cepatnya perkembangan zaman terutama di era digital ini.

Akses ke berbagai fasilitas dan media pengembangan diri semakin terbuka lebar setiap harinya. Ditambah banyaknya dukungan yang diberikan Pemerintah melalui beragam kegiatan sudah seharusnya memupuskan berbagai alasan untuk menunda dan bermalas-malasan.

Jika Boedi Oetomo berjuang melawan penjajah, maka lawan paling besar yang saat ini harus dikalahkan pertama kali adalah diri sendiri. Melawan kemalasan, melawan ketidakpercayaan diri, melawan pikiran pesimis. Menjadi generasi yang berkarya, berupaya, dan berdaya.

Bertumbuh dengan pola pikir yang baik dan komitmen yang kuat, generasi muda Indonesia khususnya, dipastikan bisa membawa harapan baru bagi kemajuan bangsa.



# Pembukaan Layanan Daycare

Fasilitas Ramah Anak untuk Para Ibu Hebat



Seiring meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja masih meninggalkan persoalan diantaranya dalam hal pengasuhan anak. Meninggalkan sang buah hati yang masih kecil di rumah saat kedua orang tua harus bekerja menjadi dilema besar yang dihadapi kaum ibu pekerja. Tidak adanya ART dengan berbagai alasan, serta jauhnya jarak rumah dengan orang tua yang juga sudah lanjut usia berujung pada butuhnya kehadiran orang lain untuk menjaga sang anak saat bekerja.

Bahkan menurut Data Profil Anak Usia Dini 2021 disebutkan bahwa 4 dari 100 anak usia dini pernah mendapatkan pengasuhan tidak layak.

Pentingnya kehadiran *Daycare* Ramah Anak juga menjadi faktor pendukung dalam mengurangi beban kekhawatiran dan mengoptimalkan produktivitas kerja perempuan pekerja yang sudah mempunyai anak untuk memenuhi kebutuhan pengasuhan anak sementara.

Pentingnya kehadiran *Daycare* Ramah Anak juga menjadi faktor pendukung dalam mengurangi beban kekhawatiran dan mengoptimalisasi produktivitas kerja perempuan pekerja yang sudah mempunyai anak untuk memenuhi kebutuhan pengasuhan anak sementara.

Keresahan ini menjadi perhatian Kementerian Kominfo yang diwujudkan melalui layanan *Daycare* Ramah Anak yang kini telah dibuka kembali setelah sebelumnya sempat terhenti akibat pandemi Covid-19. Fasilitas *Daycare* atau penitipan anak melayani kebutuhan pengasuhan anak secara gratis untuk para orang tua yang bekerja di Kementerian Kominfo.





*Daycare* Ramah Anak merupakan tempat/wadah yang memberikan layanan pengasuhan anak sementara untuk anak usia 0-6 tahun dari orang tua pekerja yang memberikan kualitas pengasuhan dan tumbuh kembang bagi anak berdasarkan hak-hak dasar anak sesuai dengan tahapan perkembangannya.



"Hal ini menjadi tantangan untuk memastikan anak dari perempuan atau orang tua bekerja tetap mendapatkan pengasuhan berbasis hak anak saat mereka ditinggalkan, yang salah satunya melalui layanan pengasuhan di luar keluarga atau pengasuh pengganti melalui *Daycare* Ramah Anak," ungkap Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Rohika Kurniadi Sari pada Rapat Koordinasi Persiapan Layanan *Kids Daycare* yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo) dalam rangka meningkatkan layanan *Daycare* di lingkungan Kominfo (17/05/23).

Penyediaan tempat penitipan anak telah sejalan dengan salah satu arahan Presiden untuk mendukung peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak sebagaimana yang dijelaskan oleh Rohika bahwa penyediaan *Daycare* Ramah Anak telah diamanatkan dalam No. 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak Di Tempat Kerja. Penyediaan *Daycare* Ramah Anak menjadi penting ketika anak terpisah sementara saat ibu atau orang tua bekerja, mengingat pengasuhan usia balita sulit dilepaskan dari peran ibu/perempuan.





Meski tak memungut biaya, Kabiro umum Sensilaus Dore menegaskan bahwa pengelola maupun orang tua memiliki hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi. Salah satunya dengan memastikan anak yang dititipkan dalam kondisi sehat. Menurutnya ini penting untuk meminimalisasi persoalan yang tak terduga.

“Kami akan melakukan perbaikan supaya kelayakan dapat memenuhi harapan keluarga, orang tua, dan harapan kita semua sehingga anak-anak kita bisa menjadikan ini sebagai rumah keduanya selama orang tua mereka bertugas,” ujarnya saat membuka acara tersebut di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (12/05/2023).



## Lantik 4 Pejabat Tinggi Madya, Mahfud MD Minta Tingkatkan Tata Kelola Kebijakan



Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Komunikasi dan Informatika, Moh. Mahfud MD melantik 4 (empat) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Empat pejabat yang dilantik antara lain Wayan Toni Supriyanto, Arief Tri Hardiyanto, Mochamad Hadiyana, dan R. Wijaya Kusumawardhana yang masing-masing menempati posisi sebagai Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Inspektur Jenderal, Staf Ahli Bidang Teknologi, serta Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya.

"Hari ini telah kita lantik bersama 4 (empat) orang pejabat untuk mengemban amanah pada posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPT Madya) yang sudah lama kosong di lingkungan Kementerian Kominfo," ujar Plt. Menkominfo Moh. Mahfud MD di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (23/05/2023).

Plt Menteri Moh. Mahfud MD berharap melalui pengukuhan ini, komitmen Kementerian Kominfo juga semakin kuat untuk mendorong reformasi manajemen yang lebih andal, berintegritas, serta akuntabel guna mewujudkan

agenda transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Transformasi digital yang demikian diharapkan dapat membuka jalan konektivitas digital dan turut membawa terang cahaya teknologi hingga ke seluruh pelosok Nusantara.

"Perlu kembali digarisbawahi bahwa transformasi digital yang terus didorong oleh Kementerian Kominfo adalah suatu kebutuhan yang perlu kita kerjakan bersama, tidak hanya secara efektif dan efisien tetapi juga dengan profesionalisme dan akuntabilitas", ungkapnya.

Sebelum dilantik, keempat orang pejabat ini telah melalui proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang berjalan sejak tanggal 26 Oktober 2022 lalu. Proses tersebut diawali dengan permintaan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang kemudian diumumkan pelaksanaan pengisian jabatan melalui seleksi secara terbuka dan kompetitif pada 10 November 2022 lalu.

Disamping itu, proses seleksi JPT Madya sendiri juga terdiri dari tahapan administrasi, penulisan makalah, asesmen, dan wawancara.

## Cetak Talenta Vokasi Jago Digital, Kominfo Fasilitasi Pelatihan dan Sertifikasi



Kementerian Komunikasi dan Informatika melatih dan memfasilitasi sertifikasi Berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk talenta digital bidang vokasi.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo Hary Budiarto menyatakan pelatihan dan sertifikasi itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan SDM digital bidang *Data Science* dan konvergensi Desain Multimedia.

"Kebutuhan talenta digital makin berkembang seiring perkembangan teknologi, sehingga pemenuhan kebutuhan SDM bidang tersebut perlu diwujudkan," ujarnya saat membuka Pelatihan dan Sertifikasi Tema *Associate Data Scientist* dan *Intermediate Multimedia Designer* di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (12/05/2023).

Pelatihan itu merupakan bagian dari Program Digital Talent Scholarship Tahun 2023 Akademi *Vocational School Graduate Academy* (VSGA). Menurut Kabalitbang SDM Kementerian Kominfo, program itu merupakan bagian dari penyiapan SDM talenta digital telah dicanangkan Pemerintah di dalam Peta Jalan Indonesia Digital 2021–2024.

"Ini bagian dari upaya mewujudkan pilar keempat yaitu masyarakat digital, sehingga Balitbang SDM merancang sejumlah akademi dalam Program Digital Talent Scholarship," jelasnya.

Hary Budiarto menyatakan, Akademi VSGA dalam Program DTS 2023 ditujukan untuk memberikan fasilitasi bagi lulusan pendidikan vokasi.

Dalam acara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Riena Retnaningrum menyambut baik pelatihan dan sertifikasi untuk lulusan vokasi itu.

Ketua Kelompok Kerja Akademi VSGA Program DTS 2023 menyatakan pelatihan diikuti 100 orang peserta dari Kota Semarang dan sekitarnya. "Kami melakukan seleksi yang ketat dari total 350 orang pendaftar," jelasnya.

Setelah mengikuti pelatihan, setiap peserta berkesempatan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi bersama asesor dari lembaga sertifikasi profesi.



## Jadi Program Strategis Nasional, Penyediaan BTS 4G Tetap Berlanjut

Kementerian Komunikasi dan Informatika tetap melanjutkan pembangunan Program Penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS) 4G di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal. Pelaksana Tugas Menkominfo Mahfud MD menyatakan sebagai salah satu program strategis nasional penyediaan BTS 4G sangat dibutuhkan masyarakat.

"Sekarang masih diusahakan untuk dilanjutkan, karena (program penyediaan BTS 4G) itu proyek *multi-years* yang sudah berlangsung 14 tahun, kalau tidak diteruskan, ya, rugi," tandasnya dalam Konferensi Pers di Ruang Serbaguna Kantor Pusat Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (22/05/2023).

Penyediaan BTS 4G merupakan salah satu program untuk Akselerasi Transformasi Digital nasional sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

"Proyek itu akan jalan sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional kita di bidang komunikasi dan informasi dengan teknologi yang canggih dan mutakhir," ujar Mahfud MD.

Plt Menkominfo Mahfud MD meminta agar semua pihak membedakan kasus hukum yang saat ini tengah berproses di Kejaksaan Agung.

"Bedakan juga dengan kasus hukumnya, kasus hukum akan terus dijalankan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan saya membuka diri sudah menghubungi Kejaksaan Agung. Silahkan saja kalau perlu informasi apa, memeriksa apa, dan siapa di Kominfo dipersilahkan agar kasus itu menjadi selesai," tuturnya.

Sebelumnya, Plt. Menkominfo menggelar rapat koordinasi dengan pejabat Eselon I di Kementerian Kominfo. Dalam rapat koordinasi tidak ada pembahasan yang substantif.

"Saya baru saja memimpin rapat pertama dengan para pejabat Eselon I. Hanya mendengarkan saja tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing. Apa yang akan dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan dan apa problemnya. Tidak ada informasi yang lebih dari itu. Tadi baru dapat dua ke dirjenan dari lima pejabat eselon I, akan diteruskan besok lagi," ujarnya.

Dalam konferensi pers, Plt Menkominfo Mahfud MD didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong.

## Tingkatkan Akses Informasi Publik bagi Disabilitas, Kominfo Siapkan info.go.id



Kementerian Komunikasi dan Informatika terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informasi publik oleh badan publik negara.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong menyatakan sebagai regulator telah membuat kebijakan di bidang informasi dan komunikasi yang inklusif. Salah satunya dengan penyediaan akses informasi melalui info.go.id.

“Berupa rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Ramah Bagi Penyandang Disabilitas.” ujarnya dalam sambutan pembuka Workshop Mewujudkan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Yang Ramah Bagi Penyandang Disabilitas, yang dibacakan Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen IKP Kementerian Kominfo, Hasyim Gautama dari Grand Hyatt Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (11/05/2023).

Penyusunan kebijakan tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

“...diharapkan dapat memenuhi hak penyandang disabilitas dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi

"Kementerian Kominfo memiliki tanggungjawab untuk menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Kebijakan yang bersifat inklusif ini diharapkan dapat memenuhi hak penyandang disabilitas dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi," ungkap Direktur Hasyim Gautama.

"Tidak hanya mengakses informasi melalui internet, tetapi kita juga perlu meningkatkan melalui kemudahan tersebut dengan menginterasikan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik melalui aplikasi umum," ujarnya.

## Aplikasi Umum

Saat ini Kementerian Kominfo tengah mengembangkan aplikasi umum layanan informasi publik nasional guna memudahkan penyandang disabilitas dalam mencari informasi publik. Direktur Hasyim Gautama mengungkapkan aplikasi ini nantinya terintegrasi melalui [info.go.id](http://info.go.id) yang dilengkapi dengan beragam fitur.

"Fitur-fitur ini adalah komitmen dari Kominfo untuk memberikan akses informasi dan komunikasi publik yang ramah untuk penyandang disabilitas. Kominfo menyediakan akses tersebut di layanan informasi melalui [info.go.id](http://info.go.id)," ungkapnya.

Dalam aplikasi berbasis web itu ada fitur untuk memperbesar teks, memperkecil teks, kemudian juga ada suara, serta juga bisa mengatur rata kiri-rata kanan.

"Fitur itu memudahkan bagi disleksia, dan juga untuk berbagai macam ragam dari disabilitas dan itu kita kenalkan dalam acara pagi ini," tutur Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen IKP Kementerian Kominfo.

Menurut Direktur Hasyim Gautama, layanan komunikasi dan informasi publik yang inklusif dan mudah diakses merupakan hal yang krusial

saat ini. Oleh karena itu, keberadaan layanan informasi publik menjadi acuan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang valid.

"Selain itu, juga menjadi penyediaan informasi publik yang mudah diakses. Oleh karena itu, Kominfo terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan informasi dan komunikasi publik oleh badan publik," tandasnya.

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen IKP Kementerian Kominfo mengharapkan keberadaan aplikasi umum ini dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk membangun aplikasi sejenis.

"Sehingga dapat mengalokasikan sumber daya tersebut pada aspek lain yang membutuhkan," ungkapnya.

Workshop Mewujudkan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Ramah bagi Penyandang Disabilitas. Rangkaian acara *Open Government Week 2023* itu ditujukan untuk berbagi pengalaman dalam pengembangan aplikasi layanan yang memudahkan akses bagi penyandang disabilitas. Workshop itu merupakan kolaborasi Kementerian Kominfo bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Open Government Indonesia*, dan Suarise.





## Tingkatkan Produktivitas, Kominfo Dampingi Pelaku UMKM Adopsi Teknologi Digital

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mendampingi 100 pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) produsen sektor pengolahan agar bisa mengoptimalkan potensi dan produktivitas. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel A. Pangerapan menyatakan hal itu dilakukan dengan mengikis tantangan UMKM dalam mengadopsi teknologi digital.

“Melalui program ini, Kominfo akan meningkatkan kemampuan adopsi digital atau *scale up* pelaku UMKM agar produktivitasnya meningkat. Selain itu Kominfo memfasilitasi inkubasi bisnis 100 pelaku UMKM binaan Kementerian Kominfo yang sudah memiliki kemampuan digital dalam memasarkan produknya,” jelasnya dalam Peluncuran Program Adopsi Teknologi Digital dan Inkubasi Bisnis UMKM “UMKM Level Up” Tahun 2023, di Jakarta Pusat, Senin (22/05/2023).

Sejak tahun 2021, Kementerian Kominfo telah melakukan pendampingan terhadap 26.000 pelaku UMKM agar aktif berjualan secara online (*go online*). Kemudian, pada tahun 2022, Kementerian Kominfo mendampingi 30.000 pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan adopsi digital. Tahun ini ditargetkan bisa mendampingi 20.000 pelaku UMKM.

“Tahun ini terdapat sedikit perbedaan program dengan adanya kegiatan inkubasi bisnis, dimana akan dilakukan pendampingan bisnis meliputi *business model canvas*, pengembangan produk, strategi digital marketing, *branding* dan desain produk, *copywriting*, hingga keuangan dan nonkeuangan,” jelas Dirjen Aptika Kementerian Kominfo.

Menurut Dirjen Samuel, tahun 2023 Kementerian Kominfo menargetkan akan dapat memfasilitasi 20.000 pelaku UMKM dengan Program Adopsi Teknologi Digital.

# 20.000 UMKM

# 110 Fasilitator

# 6 Bulan program

“Dengan melibatkan 110 fasilitator selama 6 bulan. Harapannya, peningkatan level adopsi teknologi digital dan peningkatan kemampuan bisnis ini dapat menaikkan kelas (*Level Up*) para rekan UMKM Produsen Sektor Pengolahan mendorong produksi dalam negeri, dan tentunya meningkatkan nilai ekspor dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Selain itu, Kementerian Kominfo juga mendampingi 100 pelaku UMKM Binaan agar bisa mengembangkan rencana bisnis dan memanfaatkan platform digital. Inkubasi Bisnis UMKM ditujukan agar pelaku UMKM Produsen Sektor Pengolahan di 15 kawasan prioritas dapat terlatih memanfaatkan teknologi digital.

“Kawasan tersebut meliputi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Banten, Jabodetabek & Kepulauan Seribu, Jawa Timur, DI Yogyakarta & Jawa Tengah, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Papua dan Papua Barat,” jelas Dirjen Aptika Kementerian Kominfo.

Dalam melaksanakan program itu, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan penyedia platform *e-commerce*, *social commerce*, *financial technology (fintech)*, *Point of Sales System (PoS)*, dan teknologi digital 4.0 lain.

“Termasuk *Virtual Reality*, *Artificial Intelligence*, *Big Data Analytics*, dan lain-lain. Tentu semua ini tidak dapat kami laksanakan sendiri, perlu adanya kolaborasi dan kerja sama kita semua,” tandasnya.

Secara nasional. Pemerintah berupaya mengoptimalkan potensi dan produktivitas UMKM dengan meningkatkan produksi dalam negeri, meningkatkan nilai substitusi ekspor dan melakukan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

Kementerian Kominfo telah membuka pendaftaran untuk program ini sejak tanggal 2 Mei 2023. Pelaku UMKM dapat mendaftarkan diri secara daring melalui tautan <https://umkmlevelup.id/pendaftaran>.



Dalam acara itu hadir Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Kemenkop UKM, Sutarmo; Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal (PIPM) Kementerian Investasi BKPM, Ira Damayanti; Direktur Ekonomi Digital Ditjen Aptika Kementerian Kominfo, I Nyoman Adhiarna; Ketua Umum *Indonesia Dispora SME Export Empowerment Development (ID SEED)* Yuliot; Ketua Koperasi dan UMKM Digital Nasional, Cipto Utomo; CEO PT Ultima Rasa Akselerasi, Bonnie Susilo, COO Mark Plus Institut, Ardhi Ridwansyah; serta perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, platform digital, fasilitator UMKM, dan pelaku UMKM.

# Uji Publik Kajian Implementasi Embedded Subscriber Identity Module (e-SIM)



Dalam rangka implementasi teknologi *Embedded Subscriber Identity Module (e-SIM)* di Indonesia, Direktorat Telekomunikasi, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang melakukan Kajian Implementasi e-SIM di Indonesia. Kajian yang telah disusun bertujuan untuk:

- 01 Memperoleh gambaran mengenai teknologi e-SIM dan implementasinya
- 02 Analisis kebijakan atau regulasi e-SIM yang dibutuhkan untuk mendukung pembentukan ekosistem e-SIM di Indonesia
- 03 Memperoleh gambaran dampak kebijakan atau regulasi dalam mendukung implementasi serta perkembangan industri dan ekosistem e-SIM di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan

Adapun sistematika draf kajian implementasi e-SIM adalah sebagai berikut:

- Bab 1. Pendahuluan
- Bab 2. Teknologi e-SIM
- Bab 3. *Outlook* Implementasi e-SIM
- Bab 4. Tinjauan Implikasi Implementasi e-SIM
- Bab 5. Data Empiris
- Bab 6. Pengaturan Implementasi e-SIM
- Bab 7. Risiko Pengaturan Implementasi e-SIM
- Bab 8. Kesimpulan dan Rekomendasi

Draf Uji Publik kajian implementasi e-SIM dimaksudkan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari para pemangku kepentingan yang terkait dengan implementasi e-SIM untuk menyempurnakan materi kajian, sehingga dihasilkan kajian yang komprehensif dan akurat untuk mendukung ekosistem e-SIM di Indonesia.

Tanggapan terhadap Uji Publik kajian implementasi e-SIM ini dapat disampaikan melalui email [subditpenomoran@kominfo.go.id](mailto:subditpenomoran@kominfo.go.id) sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.

Naskah kajian dapat diunduh pada tautan:



[http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Kominfo-draft-kajian-implementasi-R1\\_NA%20ESIM%202023.pdf](http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Kominfo-draft-kajian-implementasi-R1_NA%20ESIM%202023.pdf)



## Ditjen SDPPI Resmikan Laboratorium Pengujian HCT Indonesia

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika resmikan laboratorium pengujian perangkat telekomunikasi milik PT. Hyundai Calibration and Certification Technologies Indonesia.

"Pada tahun 2020 lalu Direktur Jenderal SDPPI melakukan penunjukan kepada PT. HCT Indonesia yang telah memiliki beberapa teknologi pengujian teknis yang dirasa diperlukan untuk mempercepat sekaligus menilai kesesuaian perangkat HKT dan Non-HKT di Indonesia" Ucap Direktur Standardisasi PPI Mulyadi saat menghadiri HCT Indonesia *Opening Ceremony*, Rabu (10/05/2023).

Saat ini, Indonesia telah memiliki 11 laboratorium pengujian dalam negeri yang ditunjuk untuk membantu proses sertifikasi perangkat telekomunikasi di Indonesia. "statistik menunjukkan bahwa volume sertifikasi perangkat telekomunikasi dalam satu tahun mencapai 7000 sampai 8000 perangkat, dan dengan ditambahkan laboratorium pengujian saya yakin akan mempercepat serta mempermudah prosesnya" tambah Direktur Standardisasi PPI.

Selain itu Mulyadi juga mengungkapkan bahwa, tumbuhnya jumlah pengujian perangkat dalam negeri yang signifikan dengan munculnya teknologi baru. "Untuk itu, konformitas modern sistem penilaian akan menjadi kunci untuk mengatasi perkembangan teknologi yang cepat ini agar penyediaan layanan penilaian kesesuaian yang berkualitas dapat dipertahankan dan dikembangkan ke tingkat selanjutnya, dan saya yakin pada akhirnya akan memberikan kontribusi untuk pengembangan industri telekomunikasi di Indonesia" jelasnya.

Untuk itu saya mewakili Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) ingin mengucapkan terima kasih atas dedikasi PT. Laboratorium pengujian HCT Indonesia untuk mendukung proses sertifikasi, tanpa ragu-ragu, di antara yang terbaik. "saya secara khusus berterima kasih dan sangat menghargai HCT dan HCT Indonesia atas partisipasi aktif Anda dalam mendukung proses penilaian kesesuaian di Indonesia selama ini" kata Direktur Standardisasi PPI Mulyadi.

## Implementasi RME Terapkan Teknologi Cloud Terenkripsi



Implementasi penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME) pada fasilitas pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan *platform* SATUSEHAT menerapkan *cloud* yang terenkripsi untuk pengelolaan dan penyimpanan data. Hal ini merupakan langkah untuk memastikan keamanan data kesehatan yang tersimpan di *platform* tersebut.

“Pengelolaan dan penyimpanan data pada SATUSEHAT menggunakan *cloud* yang sudah melalui tujuh aspek asesmen yang bekerjasama dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN),” ujar Staf Ahli Teknologi Kesehatan sekaligus *Chief of Digital Transformation Office* (DTO) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Setiaji, dalam acara Diskusi Panel bertajuk “Kupas Tuntas Manfaat dan Keamanan Data Rekam Medis Elektronik (RME)” di Bogor, Sabtu (06/05/23).

Penggunaan *cloud* ini memungkinkan pasien tetap dapat memegang kontrol terhadap data pribadinya. Pasien akan mendapatkan pemberitahuan apabila ada pihak lain yang mengakses data kesehatan mereka di *platform* itu.

Selain itu, saat ini Kemenkes juga sudah menyediakan *playbook* terkait standar integrasi data dengan SATUSEHAT. Sehingga implementasi RME ini dinilai lebih aman karena sudah ada regulasi yang mengatur.

“Kementerian Kesehatan sudah menyediakan *playbook* terkait standar integrasi data dengan SATUSEHAT. Jadi sebenarnya, justru akan menjadi lebih aman, karena saat ini integrasi berada di bawah naungan regulasi, salah satunya yaitu penyedia sistem elektronik harus sudah terdaftar di Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kementerian Kominfo,” jelas Setiaji.



**Penggunaan cloud ini memungkinkan pasien tetap dapat memegang kontrol terhadap data pribadinya**



**Pengelolaan dan penyimpanan data pada SATUSEHAT menggunakan cloud yang sudah melalui tujuh aspek asesmen yang bekerjasama dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN)**

Setiaji menyebut, prinsip keamanan dan kerahasiaan data serta informasi menjadi aspek penting dalam implementasi RME, sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 Tahun 2022, yang mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk menggunakan RME dalam menjalankan sistem pencatatan riwayat medis pasien secara elektronik.

“Mungkin Rekam Medis Elektronik banyak membuat klinik ketar-ketir, mulai dari proses adaptasi hingga khawatir akreditasi dicabut. Sebenarnya, sudah sejak lama banyak pihak yang ingin melakukan digitalisasi kesehatan, namun peraturannya tidak ada, akhirnya terbit Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Ekonomi Digital Kemkominfo, I Nyoman Adhiarna mengatakan bahwa aspek keamanan data juga menjadi perhatian Kementerian Kominfo. Saat ini, pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang menjadi amanat dari Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

“Rancangan Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan UU PDP ini akan membahas mengenai sanksi, sengketa dan kelembagaan yang melindungi data pribadi. Kami mengharapkan adanya dukungan dari semua pihak, baik dari pemangku kebijakan dan juga pelaku industri,” ujarnya.



Lebih lanjut, Direktur Nyoman turut menyampaikan komitmen Kemkominfo untuk terus memperkuat kolaborasi dan memberikan dukungan agar ekosistem industri kesehatan, khususnya implementasi RME, semakin berkembang.

“Melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kemkominfo menyelenggarakan serangkaian kegiatan kolaborasi untuk mendorong adopsi teknologi Rekam Medis Elektronik, yang kami percaya banyak manfaatnya bagi masyarakat. Salah satunya melalui diskusi panel kali ini, yang merupakan bagian dari rangkaian program Sinergi Adopsi Rekam Medis Elektronik (RME) bersama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kabupaten Bogor”, tuturnya.

## Pelatihan Thematic Academy di Kabupaten Sijunjung Bagi Guru dan Tenaga Pendidik



Pelatihan *Thematic Academy* (TA) ini diikuti oleh delapan puluh orang peserta, terdiri dari guru dan tenaga kependidikan yang berasal dari sekolah-sekolah yang ada di Sijunjung. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 4 Mei 2023 di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Muaro Sijunjung yang dibuka langsung Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir.

Plt. Kepala BBPSDMP Kominfo Medan, Yusrizal, S.Kom., M.Eng mengatakan pelatihan ini merupakan kegiatan bersama Pemkab Sijunjung melalui Dinas Kominfo Sijunjung bersama Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian (BBPSDM) Kominfo Medan. Kegiatan ini dapat terwujud berkat kerja keras Dinas Kominfo Sijunjung dalam peningkatan SDM di Sijunjung.

## Pelatihan Government Transformation Academy (GTA) 2023 Provinsi Kepulauan Riau



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kepulauan Riau bekerja sama dengan Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian (BBPSDMP) Kominfo Medan menyelenggarakan kegiatan *Government Transformation Academy* (GTA). Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel CK Tanjungpinang, pada tanggal 29 Mei s/d 02 Juni 2023.

Acara ini dihadiri oleh Plt. Kepala BBPSDMP Kominfo Medan, Bapak Yusrizal, S.Kom., M.Eng., Kepala Badan Litbang SDM Kemkominfo, Bapak Dr. Eng. Hary Budiarto, M. Kom, IPM. secara daring dan dibuka oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Drs. Sardison, M.TP.

## BPSDMP Kominfo Manado Latih 90 Lulusan SMK di Kota Palu untuk Mengikuti Pelatihan VSGA



Plt.Kepala BPSDMP Kominfo Manado yang diwakili Ketua Tim SDM BPSDMP Kominfo Manado membuka kegiatan pengembangan SDM Digital Kota Palu tahun 2023, dalam rangka mendukung program pengembangan SDM khususnya di wilayah Kota Palu. BPSDMP KOMINFO Manado bersama Pemerintah Daerah Kota Palu, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Palu melaksanakan pelatihan *Digital Vocational School Graduate Academy* sebanyak 4 Kelas dengan Tema Operator Komputer Madya 2 Kelas, *Junior Web Development 1 Kelas*, *Junior Network Administrator 1 Kelas*.

Kegiatan dihadiri oleh Plt.Kepala BPSDMP KOMINFO Manado, Yang diwakili Oleh Ketua Tim SDM Ibu Qurata Ayuni, ST., M.I.Kom, Sekretaris Daerah Kota Palu, Ibu Irmayanti Pettalolo, S.Sos., MM, Kepala Dinas Kominfo Kota Palu, Bapak Usman, SH, - Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Tengah, Ibu Yudiawati V. Windarruslana, SKM., M.Kes yang pada saat ini diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan SMK ibu Dr. Hj. Hatijah Yahya, M.Si, - Moderator dari Dinas Perhubungan, Kab. Sigi Bapak Zulfikar

Saifuddin dan para lulusan SMK se-Kota Palu dengan total 90 peserta.



Pada kegiatan pembukaan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Palu ruang Aula Serba Guna, Ibu Qurata dalam sambutannya mengajak seluruh alumni SMK yang mengikuti pelatihan VSGA di kota palu untuk tetap terus meningkatkan SDM agar kedepan dapat membantu daerah dengan keahlian yang di miliki. Pelatihan ini diadakan untuk mempercepat pertumbuhan digital terlebih untuk pengembangan SDM vokasi di Indonesia.

## Jabfung Pengendali Frekuensi Radio, Ujung Tombak Pelayanan Ditjen SDPPI



Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menggelar kegiatan Uji Kompetensi PNS dalam Pengangkatan Jabatan Fungsional (Jabfung) Pengendali Frekuensi Radio melalui Perpindahan Jabatan guna meningkatkan kinerja organisasi di bidang Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio agar memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.

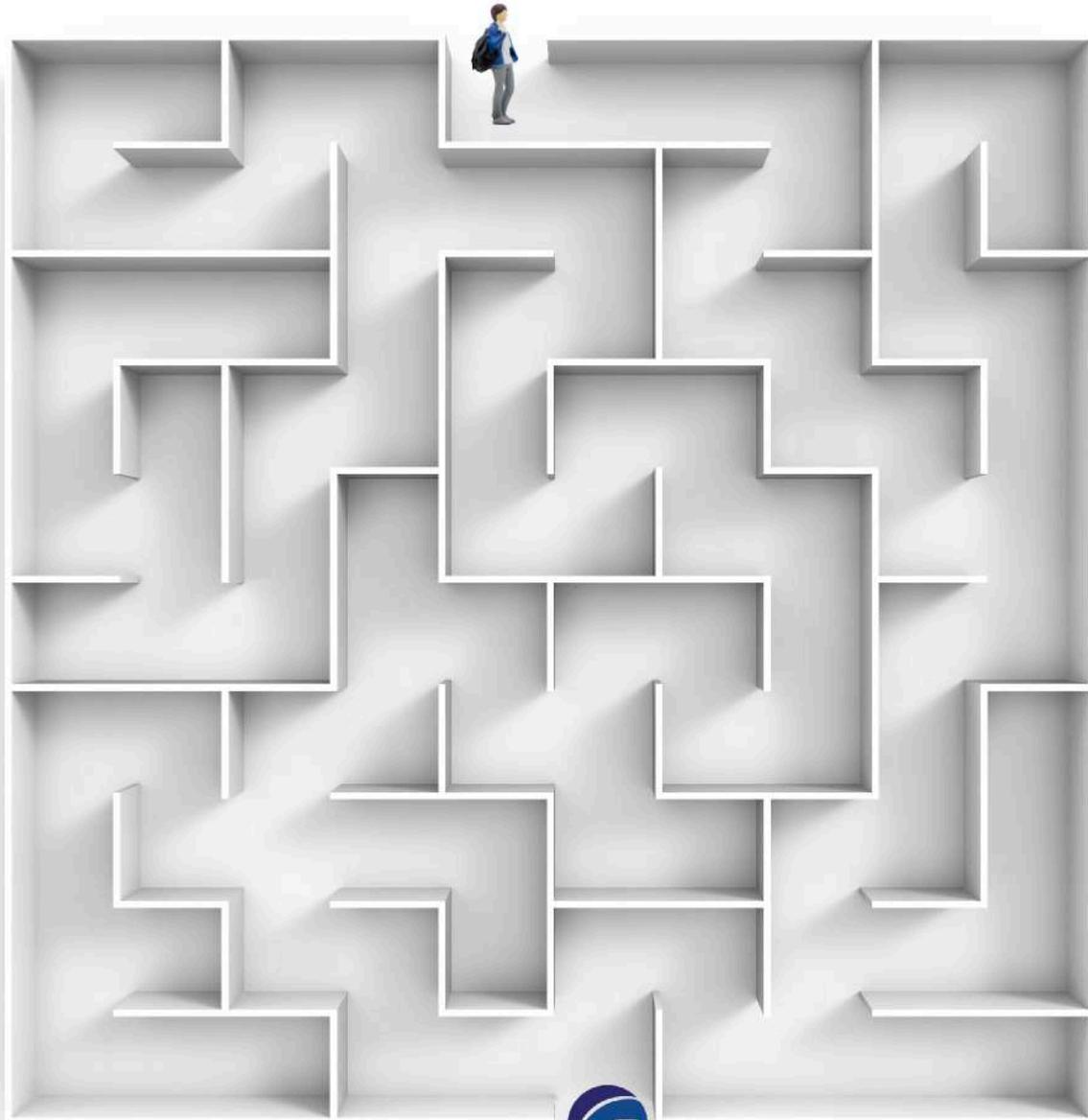
Pengendali Frekuensi merupakan ujung tombak Negara dalam memberikan Pelayanan Publik yang berkualitas terkait pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio serta penggunaan perangkat telekomunikasi yang telah terstandardisasi.

“Oleh karena itu, menjadi tugas kami memastikan bahwa para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memangku Jabatan Pengendali Frekuensi Radio adalah personel-personel yang Kapabel, Berintegritas, dan Profesional, karena mengemban tugas yang tidak mudah” ucap Siti Chadidjah selaku Ketua Tim Kerja Manajemen Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi saat membuka kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Senin, (29/05/2023).

Uji Kompetensi diadakan khusus untuk pengangkatan bagi para Pelaksana yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi Pejabat Fungsional Pengendali Frekuensi Radio melalui jalur perpindahan jabatan PFR. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan Keputusan Dirjen No. 109 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio yaitu dengan tahapan Ujian CAT, Praktek dan Wawancara sampai dengan hari kedua tanggal 30 Mei 2023 dengan dibagi 4 ruangan tim penguji.

Lebih lanjut Siti Chadidjah mengungkapkan bahwa menjadi tugas Setditjen SDPPI untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan untuk menjadi jabatan fungsional dapat terpenuhi. “Kami dari Setditjen SDPPI akan menyiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas” tegasnya.

Dalam rangka Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio Melalui Perpindahan Jabatan, Kegiatan Uji Kompetensi ini dihadiri juga oleh para Kepala UPT Monitor SFR, Penguji Kompetensi PRF, serta para Peserta Uji Kompetensi di lingkungan Ditjen SDPPI.



## Kamu Ikuti, Kamu Terinformasi

### Ikuti Sosial Media Kominfo

-  @Kemenkominfo
-  @kemkominfo
-  Kemkominfo
-  Kemkominfo TV
-  @kemkominfo

### Program Menarik Kominfo

- Miss Lambe Hoaks VS Fact Boy
- TokTok Kominfo
- Kominfopedia
- Netizen Bertanya Kominfo Menjawab
- Kominfo News

---

*Retweet / Share / Like / Follow / Subscribe / Love / Comment*

Selamat Memperingati

# Hari Kebangkitan Nasional Ke-115

20 Mei 2023

---

**SEMANGAT UNTUK BANGKIT!**

---

